

**PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
MENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**SAHRIN
220802044**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrin
NIM : 220802044
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Rerebe, 08 April 2002
Alamat : Buntul Musara, Tripe jaya, Gayo Lues, Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 juni 2026

Yang Menyatakan,


Sahrin
F6020AOX001274043

NIM. 220802044

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SAHRIN

NIM. 220802044

Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

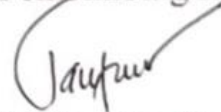
Pembimbing I



Muazzinah, B.Sc., M.P.A.

NIP. 198411252019032012

Pembimbing II



18/ - 2026

17 Ace Sigang

Dr. Taufik, Sos., MSi.

NIP. 198905182023211032

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERAN PEMANGKU KEEPENTINGAN DALAM MENAGGULANGI KEBAKARAN HUAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

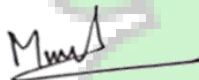
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SAHRIN
NIM. 220802044

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Agustus 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

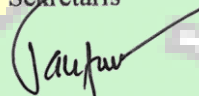
Ketua


Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

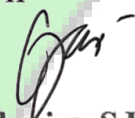
Penguji I


Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M
NIP. 198611122015031005

Sekretaris


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si
NIP. 198905182023211032

Penguji II


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Kabupaten Aceh Besar dan berdampak terhadap aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Penanggulangannya memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan, namun koordinasi antar-aktor selama ini belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang berasal dari BPBD, DLH, Kepolisian, Pemadam Kebakaran, WALHI Aceh, akademisi, media, dan masyarakat lokal Kabupaten Aceh Besar, kemudian data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi dan member check. Analisis peran pemangku kepentingan didasarkan pada Teori Peran dan Model Pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar belum menunjukkan koordinasi lintas sektor yang optimal dan lebih berfokus pada penanganan pascakebakaran dibandingkan pencegahan. BPBD berperan sebagai koordinator utama dengan dukungan Polri, Damkar, dan masyarakat pada fase respons darurat, namun performa peran pada fase pencegahan dan rehabilitasi belum optimal, disertai keterlambatan peran (role delay) pada fungsi investigasi dan penegakan hukum pascakebakaran. Berdasarkan Model Pentahelix, elemen Government dan Community terlibat aktif, sementara elemen Academics, Business, dan Media belum terintegrasi secara optimal. Faktor penghambat penanggulangan karhutla mencakup faktor teknis dan infrastruktur, faktor kelembagaan dan regulasi, serta faktor sosial dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan protokol koordinasi multi-stakeholder yang mengikat secara hukum, formalisasi mekanisme investigasi pascakebakaran, serta penguatan kapasitas teknologi deteksi dini dan sarana prasarana pemadaman kebakaran.

Kata Kunci: *Peran Pemangku Kepentingan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tantangan, Peran, Model Pentahelix, Aceh Besar*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: “Peran Pemangku Kepentingan Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Aceh Besar”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Muazzinah, M.P.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan tugas akhir ini.
6. Dr. Taufik, Sos., MSi., selaku dosen pembimbing II tugas akhir ini. Tereima kasih banyak bapak telah membimbing saya dan meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti ditengah sibuknya kegiatan

harian bapak.

7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua tersayang terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya.
9. Kepada adek, abang, dan keluarga lainnya yang sudah mendukung saya selama penyusunan tugas akhir.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Peran	10
2.1.2 Model Pentahelix.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.2.1 Novelty Penelitian	18
2.3 Kerangka Berpikir	19
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.1.1 Jenis Penelitian	20
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22

3.1.1 Lokasi Penelitian	22
3.1.2 Waktu Penelitian.....	22
3.4 Sumber Data.....	22
3.4.1 Data Primer	22
3.4.2 Data Skunder.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Informan Penelitian.....	26
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
3.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV.....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	31
4.1.1 Profil Informan Penelitian	32
4.2 Hasil Penelitian	34
4.2.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Besar	34
4.2.3 Faktor Penghambat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Besar	52
4.3 Pembahasan.....	55
4.3.1 Pembahasan Berdasarkan Teori Peran	56
4.3.2 Pembahasan Berdasarkan Model Pentahelix	59
4.3.3 Keterkaitan Teori Peran dan Model Pentahelix.....	62
4.3.4 Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian	64
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

2. 1 Penelitian Terdahulu	15
3. 1 Tabel Fokus Penelitian.....	21
3. 2 Tabel Informan Penelitian.....	26
4. 1 Profil Informan Penelitian	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Aceh Besar	2
Gambar 1. 2 Grafik Total Kejadian Karhutla di Aceh Besar Priode Tahun 2022-2025 ...	4
Gambar 4. 1 Model Kolaborasi Pentahelix Dalam Menanggulangi Karhutla di Kabupaten Aceh Besar.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	73
Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Pembimbing.....	77
Lampiran 3 Surat Penelitian	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan paling serius di Indonesia yang terus berulang setiap tahun dan menimbulkan dampak multidimensional, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, sosial, maupun ekonomi.¹ Fenomena karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.² Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.³

Secara nasional, Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menjadi permasalahan lingkungan yang berdampak luas. Kebakaran tersebut umumnya dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan oleh pemilik lahan, perusahaan, maupun masyarakat, kemudian diperparah oleh kondisi kekeringan akibat fenomena El Niño yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga api lebih sulit dipadamkan.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian karhutla masih menjadi tantangan besar bagi

¹ I K Putra, Basuki Hero Saharjo, and Bambang Wasis, "Analysis of Indonesian Forest and Land Fire Controlling Operational Policies: Case Study: Siak Regency, Riau Province," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2019), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/363/1/012016>.

² Fajri Fadhillah, "Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (2017): 51–85, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i1.34>.

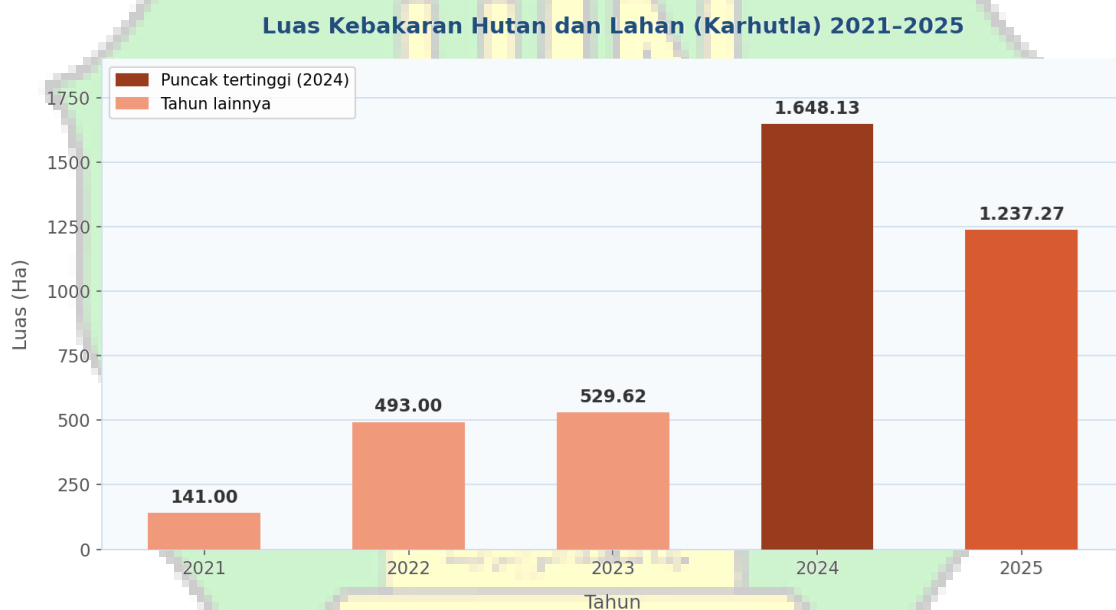
³ Douglas Mckee, "Health Consequences of Forest Fires in Indonesia Elizabeth Frankenberg," 2004.

⁴ Sedimentary Basin et al., "Scientists Assess Impact of Indonesia Fires Micro Studies Lead to Macro Understanding" 78, no. 44 (1998): 3–4.

pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan, kebakaran hutan di Indonesia sering menimbulkan kabut asap lintas negara yang berdampak terhadap hubungan regional di kawasan Asia Tenggara.

berdasarkan data SIPONGI KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan luas lahan terbakar yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:⁵

Gambar 1. 1 Grafik Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Aceh Besar



Sumber: SIPONGI KLHK, *Indikasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan*, 2026

<https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>, diakses 18 Mei 2026.

Berdasarkan Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar mengalami perubahan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi dan

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Indikasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan” (SIPONGI KLHK, May 18, 2026), <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>.

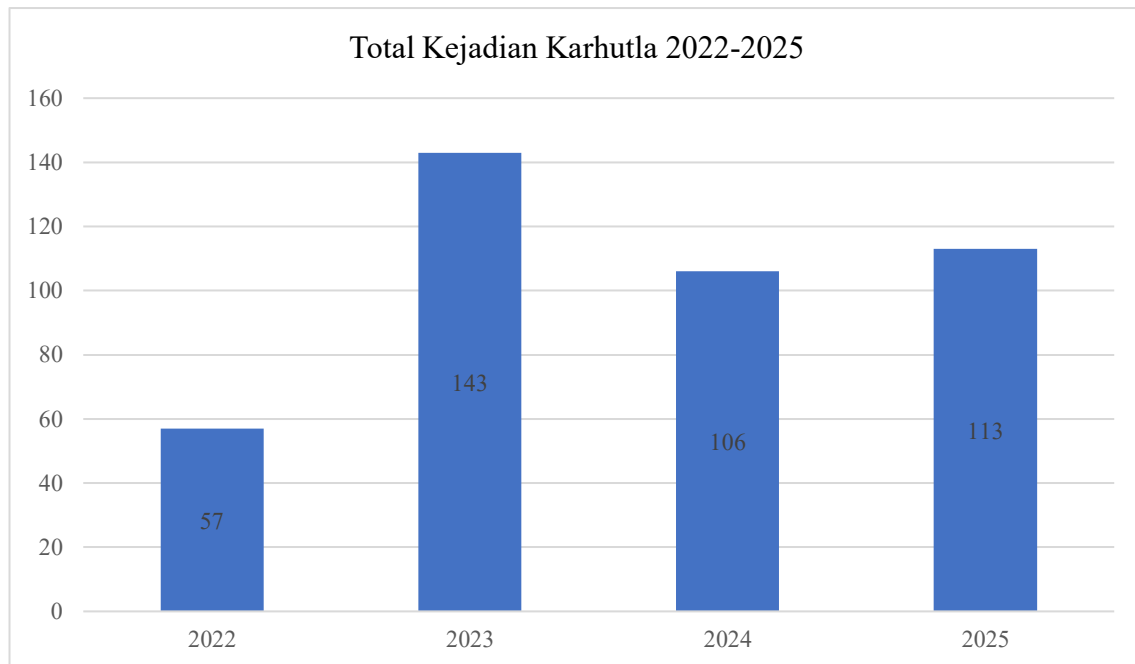
memerlukan penanganan yang serius. Perubahan luas lahan terbakar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, musim kemarau, aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta kurang optimalnya pengawasan dan pencegahan kebakaran di lapangan.

Kabupaten Aceh Besar memiliki kawasan hutan yang luas dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah pegunungan serta kawasan konservasi. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap kebakaran, terutama pada musim kemarau panjang. Selain faktor alam seperti suhu panas ekstrem, rendahnya curah hujan, dan kekeringan vegetasi, kebakaran hutan dan lahan di Aceh Besar juga banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia (human error). Berdasarkan pernyataan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolda Aceh, sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan di Aceh disebabkan oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka kebun maupun membersihkan lahan pertanian.⁶

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar mencatat bahwa kejadian karhutla mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam periode dari tahun 2022 -2023 hingga terjadi penurunan di tahun 2024 dan kembali meningkat di tahun 2025. Secara kumulatif, total kejadian hutan dan lahan yang terbakar selama empat tahun mencapai 419 kejadian. Tren ini menjadi latar belakang empiris yang menegaskan urgensi penelitian tentang peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi karhutla di wilayah ini.

⁶ ANTARA News, "Kapolda Sebut Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Aceh Karena Dibakar," 2021. Diakses pada tanggal 10 november 2024.
<https://www.antaranews.com/berita/2025408/penanganan-karhutla-di-aceh-sudah-sesuai-instruksi-presiden>

Gambar 1. 2 Grafik Total Kejadian Karhutla di Aceh Besar Priode Tahun 2022-2025



Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Besar, 2026 (diolah peneliti)

Permasalahan karhutla di Aceh Besar tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara ekologis, kebakaran hutan menyebabkan degradasi lahan, rusaknya habitat satwa, menurunnya kualitas tanah, dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Secara kesehatan, asap hasil kebakaran menimbulkan gangguan pernapasan bagi masyarakat. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus ISPA cenderung meningkat pada wilayah terdampak asap karhutla, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.⁷

Dari sisi ekonomi, karhutla juga menyebabkan kerugian yang besar. Aktivitas pertanian masyarakat terganggu, biaya penanggulangan bencana meningkat, serta

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Dampak Asap Karhutla Terhadap Kesehatan Masyarakat," n.d.

produktivitas masyarakat mengalami penurunan akibat terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi.⁸ Selain itu, kerusakan kawasan hutan dapat mengancam sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan pertanian.

Dalam upaya penanggulangan karhutla, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengendalian karhutla, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh.⁹ Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan secara signifikan.

Dalam praktiknya, penanggulangan karhutla tidak bisa mengandalkan satu pemangku saja, melainkan harus melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Media, Akademisi, masyarakat, hingga sektor swasta. Setiap stakeholder memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca kebakaran. Namun, koordinasi dan kerja sama antar stakeholder dalam penanggulangan karhutla masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

⁸ N A Ulya et al., "Peat Swamp Forest Degradation: Impacts, Affected Communities and Losses," in *E3S Web of Conferences*, vol. 68 (EDP Sciences, 2018), 3007, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186803007>.

⁹ "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan," 2016.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala serius. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, banyak daerah mengalami keterbatasan personel pemadam, minimnya fasilitas pemantauan hotspot, serta kurangnya peralatan pemadaman modern.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan respons terhadap kebakaran sering terlambat sehingga api cepat meluas dan sulit dikendalikan.

Permasalahan lain yang juga cukup dominan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan. Sebagian masyarakat masih menggunakan metode pembakaran karena dianggap lebih murah, cepat, dan praktis dibandingkan metode pembukaan lahan tanpa bakar.¹¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan karhutla tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kolaborasi antar stakeholder.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan penanggulangan karhutla sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran para pemangku kepentingan. Setiap stakeholder memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pasca kebakaran.¹² Seperti DLH berperan sebagai koordinator teknis lingkungan, BPBD menangani aspek kebencanaan, TNI-Polri mendukung operasi dan penegakan hukum, pemerintah desa melakukan deteksi dini,

¹⁰ Johana Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)* 7, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692>.

¹¹ Erwin Beck, Katja Hartig, and Klaus Roos, "Forest Clearing by Slash and Burn," in *Tropical Rainforest Responses to Climatic Change*, ed. Mark B Bush and John R Flenley, 2nd ed. (Berlin: Springer, 2008), 371–74, https://doi.org/10.1007/978-3-540-73526-7_35.

¹² K Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14, no. 2 (2017): 165–86, <https://doi.org/10.20886/JAKK.2017.14.2.165-186>.

sementara masyarakat menjadi ujung tombak pencegahan di lapangan. Sinergi antaraktor tersebut menjadi faktor utama keberhasilan pengendalian karhutla di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik agar penanggulangan karhutla dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran stakeholder dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran stakeholder, pola koordinasi, serta kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar yang masih terjadi setiap tahun dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
2. Masih adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena dianggap lebih murah dan praktis.

3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, maupun pihak swasta.
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla, seperti peralatan pemadam, akses menuju lokasi kebakaran, serta teknologi pemantauan hotspot.
5. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal sehingga belum memberikan efek jera.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja faktor penghambat pemangku kepentingan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis epektifitas peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar serta mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar diharapkan memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang kebijakan lingkungan, khususnya peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta faktor penghambat dan siapa saja yang berperan dalam penanggulangan karhutla. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Penelitian ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara teori pengelolaan lingkungan dengan praktik di lapangan, sehingga memunculkan perspektif baru dalam bidang manajemen publik dan kebijakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki strategi dan kebijakan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan secara lebih efektif. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mitigasi kebakaran hutan, serta cara memperkuat sinergi tersebut. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi praktik-praktik yang berisiko menimbulkan kebakaran.

3. Manfaat bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

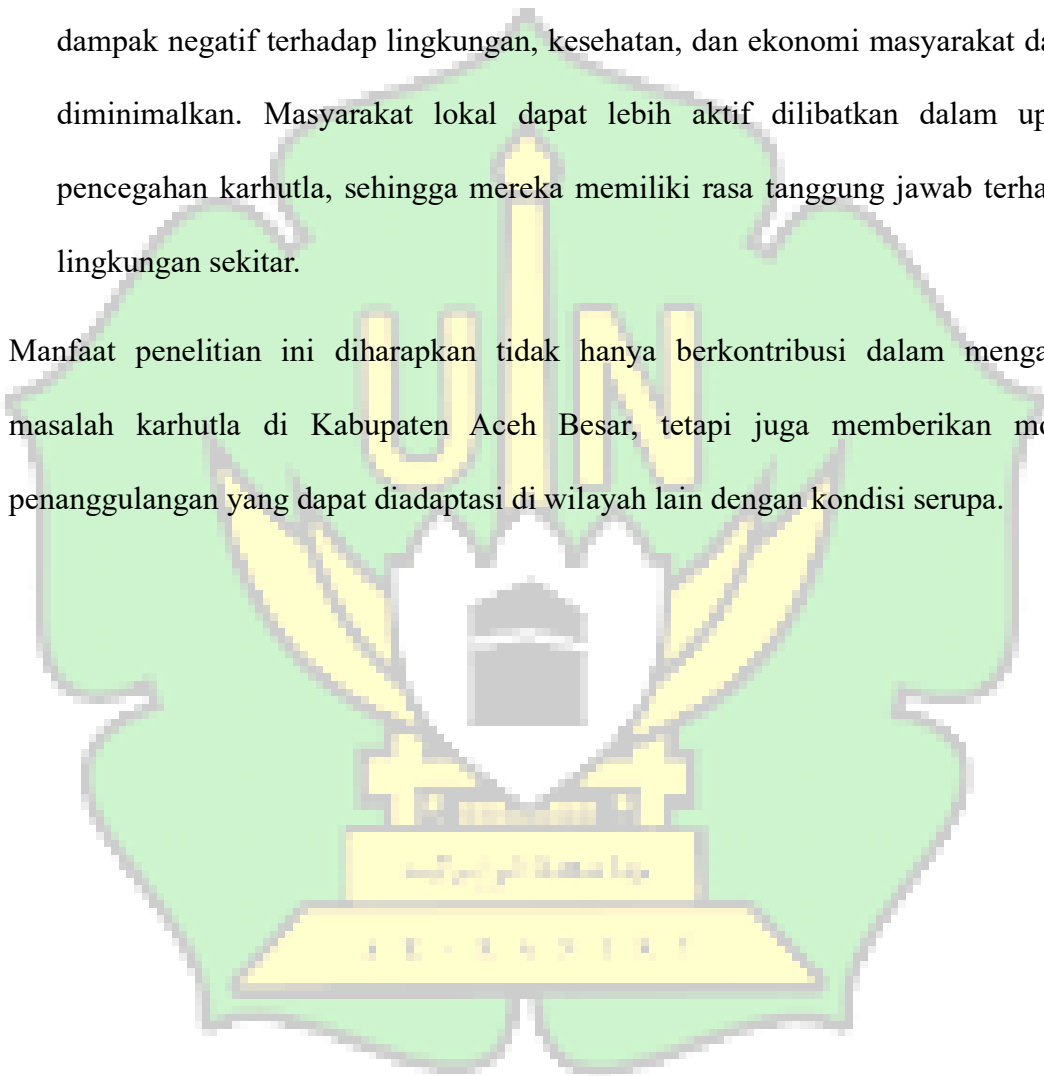
Penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, mengidentifikasi kelemahan, dan merancang langkah-langkah perbaikan. Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk

memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, sehingga memberikan efek jera.

4. Manfaat bagi Masyarakat Lokal

Dengan adanya solusi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dapat diminimalkan. Masyarakat lokal dapat lebih aktif dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam mengatasi masalah karhutla di Kabupaten Aceh Besar, tetapi juga memberikan model penanggulangan yang dapat diadaptasi di wilayah lain dengan kondisi serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa perilaku individu dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh seperangkat harapan, norma, dan tuntutan yang melekat pada posisi atau status yang dimilikinya. Menurut Biddle, peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, pelaksanaan suatu peran tidak hanya ditentukan oleh tugas formal yang diberikan, tetapi juga oleh harapan dari individu maupun pihak lain yang berinteraksi dengannya.¹³

Dalam konteks organisasi, Sluss, Van Dick, dan Thompson mengembangkan teori peran melalui perspektif relasional (*relational perspective*). Mereka menjelaskan bahwa peran terbentuk dan dijalankan melalui hubungan sosial antaranggota organisasi, sehingga efektivitas pelaksanaan peran dipengaruhi oleh kejelasan ekspektasi, interaksi antarpemangku kepentingan, serta kesesuaian antara perilaku individu dengan tuntutan organisasi.¹⁴ Oleh karena itu, teori peran digunakan untuk memahami bagaimana individu menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya, sekaligus menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pemikiran Biddle dan pengembangan konsep oleh Sluss et al, terdapat

¹³ Bruce J Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12 (1986): 67–92, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>.

¹⁴ Bryant Thompson, "ROLE THEORY IN ORGANIZATIONS: A RELATIONAL PERSPECTIVE," *Psychology*, 2011.

beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan peran dalam organisasi, yaitu:

1. Peran yang Diharapkan (Role Expectations)

Peran dalam suatu organisasi umumnya diharapkan untuk dijalankan dengan cara tertentu. Indikator ini merujuk pada ekspektasi yang ada terkait bagaimana individu harus bertindak dalam peran mereka, yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, aturan organisasi, atau kebijakan tertentu.

2. Perilaku Peran (Role Behavior)

Ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan peran mereka. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh situasional dan harapan dari peran yang dimiliki oleh individu.

3. Kesesuaian Peran (Role Congruence)

Indikator ini merujuk pada sejauh mana perilaku individu dalam menjalankan peran sesuai dengan harapan dan tuntutan organisasi. Kesesuaian peran penting untuk mencapai efektivitas dalam organisasi.

4. Peran yang Diterima (Role Acceptance)

Ini mengacu pada sejauh mana individu menerima dan menginternalisasi peran yang mereka jalankan. Penerimaan peran yang baik sering kali berhubungan dengan kesuksesan individu dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Peran yang Ditegaskan (Role Clarity)

Peran yang jelas memudahkan individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Indikator ini berfokus pada seberapa jelas individu memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam peran tertentu.

6. Peran yang Dilaksanakan (Role Performance)

Ini mengacu pada bagaimana individu menjalankan peran mereka dalam praktik sehari-hari, mencakup hasil yang tercapai serta kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi.

7. Peran yang Tertunda atau Terhambat (Role Delay or Role Conflict)

Konflik atau hambatan dalam menjalankan peran dapat mengarah pada ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas. Indikator ini menunjukkan tantangan dalam menjalankan peran yang dapat mempengaruhi efektivitas individu dan organisasi. Indikator-indikator ini berfokus pada berbagai aspek dari peran yang dimiliki individu dalam suatu organisasi dan bagaimana interaksi dengan konteks dan harapan dapat memengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi.

Dari Indikator-indikator tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai efektivitas peran stakeholder dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

2.1.2 Model Pentahelix

Model Pentahelix merupakan suatu model kolaborasi yang menekankan sinergi lima aktor utama, yaitu Government (Pemerintah), Academia (Akademisi), Business (Dunia Usaha), Community (Masyarakat), dan Media, dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik secara kolaboratif.¹⁵ Model ini dikembangkan sebagai perluasan dari konsep Triple

¹⁵ Indra Devian et al., "Adaptive Pentahelix Collaborative Governance for Forest and Land Fire Mitigation : Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin , Indonesia" 01009 (2026).

Helix dan Quadruple Helix, dengan menambahkan peran masyarakat dan media sebagai komponen penting dalam inovasi tata kelola publik.¹⁶

Konsep Pentahelix menekankan pentingnya sinergi antar stakeholder dalam menciptakan tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, model Pentahelix digunakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca kebakaran.

Dalam model Pentahelix, masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu:

1. Government (Pemerintah)

Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penanggulangan karhutla. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, melakukan pengawasan, serta mengoordinasikan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

2. Academics (Akademisi)

Akademisi berperan dalam memberikan dukungan penelitian, edukasi, pelatihan, serta inovasi teknologi yang berkaitan dengan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Akademisi juga berfungsi memberikan rekomendasi ilmiah dalam mendukung pengambilan kebijakan.

3. Business (Dunia Usaha)

¹⁶ Elias G Carayannis, Thorsten D Barth, and David F J Campbell, "The Quintuple Helix Innovation Model : Global Warming as a Challenge and Driver for Innovation," 2012, 72–73.

Dunia usaha berperan dalam memberikan dukungan sumber daya, fasilitas, teknologi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam penanggulangan karhutla.

4. Community (Masyarakat)

Masyarakat memiliki peran dalam kegiatan pencegahan, pengawasan, pelaporan, dan partisipasi aktif dalam penanggulangan karhutla di lingkungan sekitar.

5. Media

Media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi publik, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan model Pentahelix dipengaruhi oleh koordinasi, komunikasi, kepercayaan antar stakeholder, serta keberlanjutan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, model Pentahelix digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran stakeholder dan bentuk kolaborasi antaraktor dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada kajian dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu tentang peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah (gap penelitian) yang ada dan merumuskan fokus penelitian ini dengan lebih spesifik.

Table dibawah ini menyajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, meliputi nama peneliti, tahun peneliti, kerangka konseptual,

metode penelitian, teknis analisis data, serta hasil penelitian.

2. 1 Penelitian Terdahulu

No	PENULIS DAN TAHUN TERBIT	KERANGKA KONSEPTUAL	METODE PENELITIAN	TEKNIK ANALISI DATA	HASIL PENELITIAN	GAP PENELITIAN
1	Kushartati Budiningsih (2017) ¹⁷	Penelitian menggunakan teori koordinasi sebagai suatu proses (Malone & Crowston, 1990).	pendekatan kualitatif	analisis dokumen, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi lapangan.	Hasil Ppenelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah lebih banyak terjadi pada tahap pemadaman kebakaran, sedangkan koordinasi dalam tahap pencegahan masih lemah.	E: Provinsi Sumatera Selatan VS Kabupaten Aceh Besar. P: Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan VS Peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
2	Rizana (2019) ¹⁸	Peran pemerintah, definisi hukum dan partisipasi masyarakat.	Hukum sosiologis	Analisis kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.	E: Kabupaten Indragiri Hilir VS Kabupaten Aceh Besar. P: Peran pemerinah belum optimal di kabupaten Indragiri Hilir VS Peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan

¹⁷ Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan."

¹⁸ C I Vitas, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Indragilir Provinsi Riau" 2, no. 1 (2019): 52–63.

						dan lahan.
3	Johanna griselda joy saputro, I Gusti Ayu Ketut, Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha (2021) ¹⁹	Analisis faktor penyebab kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat.	Hukum empiris	Analisis kualitatif, analisis doctrinal, dan triangulasi data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesengajaan masyarakat dan kondisi alam yang mendukung, seperti musim kemarau panjang. Dampak dari kebakaran hutan ini sangat signifikan, mencakup kerugian lingkungan, kesehatan, dan reputasi internasional Indonesia akibat asap yang menyebar ke negara tetangga.	E: Provinsi Kalimantan Barat VS Kabupaten Aceh Besar. P: Efektivitas penegakan hukum, dan dampak social dan lingkungan VS Peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4	Indra Devian Lumban Gaol, Sarmini, Gading Gamaputra, Mashur Hasan Bisri, Neny Ayu Nourmanita, Lili Nur Indah Sari,	Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) dengan Model Pentahelix	Pendekatan kualitatif dengan desain Qualitative Comparative Analysis (QCA)	Qualitative Comparative Analysis (QCA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan melalui kolaborasi lima aktor Pentahelix. Pemerintah berperan sebagai koordinator utama,	E: Kabupaten Kotawaringin Timur (East Kotawaringin Regency), Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. VS Kabupaten Aceh Besar. P: Adaptive Pentahelix

¹⁹ Saputro, Handayani, and Najicha, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat."

	& Indah Permatasari Br. Barus (2026). ²⁰				masyarakat berperan dalam patroli dan deteksi dini, akademisi menyediakan riset dan inovasi teknologi, dunia usaha mendukung melalui CSR dan penyediaan sarana, sedangkan media berfungsi menyebarluaskan informasi dan meningkatkan transparansi.	Collaborative Governance for Forest and Land Fire Mitigation: Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin, Indonesia VS Peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5	Dian Novita Dewi, Andriko Sandria, dan Sritami Santi Hatmini (2023) ²¹	Teori kepatuhan, teori neoriberal, institusionalisme, dan konsep rezim internasional.	Kualitatif basic research	Kategorisasi dan klasifikasi, indektifikasi pola dan tema, dan pengolahan materi tertulis.	Penelitian menemukan bahwa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan pencemaran udara. Penegakan hukum terhadap pelanggaran juga masih dianggap kurang maksimal.	E: Indonesia (Negara) VS Kabupaten Aceh Besar. P: Kurangnya penegakan hukum dari pemerintah terhadap masalah kebakaran hutan dan masalah pencemaran udara VS Peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Sumber: Olahan Peneliti

²⁰ Devian et al., "Adaptive Pentahelix Collaborative Governance for Forest and Land Fire Mitigation : Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin , Indonesia."

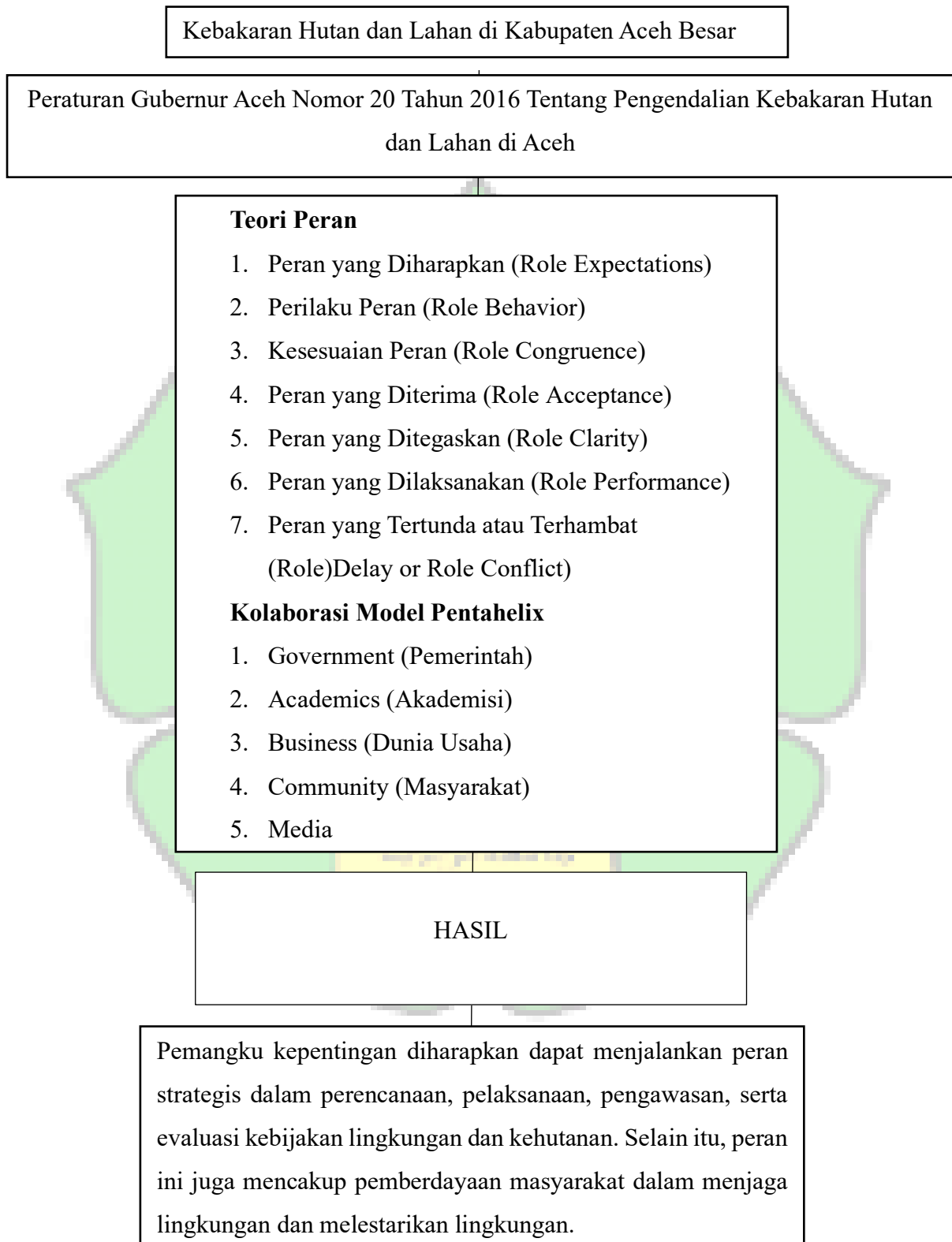
²¹ Dian Novita Dewi, Andriko Sandria, and Sritami Santi Hatmini, "Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan Riau Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," *Jurnal Transborders* 7, no. 1 (2023): 49–56.

2.2.1 Novelty Penelitian

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum, tata ruang, maupun penyebab kebakaran secara umum di tingkat nasional maupun daerah lain yang berbeda konteks geografis dan kelembagaan. Contohnya Farhan Nur Azhar, Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat dalam Karhutla di Kabupaten Santang, Rizana, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Indragiri Hilir, Johanna Griselda Joy Saputro, I Gusti Ayu Ketut, Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, dan Salsa Rahma Az Zahro, “Penguatan Tugas dan Fungsi Polhut dalam Menanggulangi Karhutla dan Dian Novita Dewi, Andriko Sandria, dan Sritami Santi Hatmini, “Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Pencemaran Udara di Indonesia.

Dari penelitian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori peran sebagai landasan konseptual, serta model pentahelix pada praktik pemangku kepentingan di wilayah ini.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan data naratif tentang individu atau perilaku yang dapat diselidiki.²²

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk dengan lebih mudah memahami dan membandingkan situasi yang sebenarnya serta menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari narasumber.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian mengacu pada suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data, yang selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif, dimana peneliti berupaya mengkaji peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian naratif dicirikan oleh tujuannya untuk memahami permasalahan yang ada melalui pengumpulan data, menyajikan gambaran deskriptif tentang situasi atau peristiwa yang diamati. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat digambarkan secara deskriptif hingga mencapai kejenuhan data. Metodologi

²² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

penelitian meliputi observasi lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, yang berpuncak pada perolehan temuan penelitian.²³

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar serta. Fokus penelitian akan mengeksplorasi kebijakan yang diterapkan oleh pemangku kepentingan serta strategi dan tantangan penanggulangan yang dilakukan dalam menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan. Berikut adalah tabel fokus penelitian:

3. 1 Tabel Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Kebijakan	a. Peran yang Diharapkan (Role Expectations) b. Perilaku Peran (Role Behavior) c. Kesesuaian Peran (Role Congruence) d. Peran yang Diterima (Role Acceptance) e. Peran yang Ditegaskan (Role Clarity) f. Peran yang Dilaksanakan (Role Performance) g. Peran yang Tertunda atau Terhambat (Role Delay or Role Conflict)	Sluss, D. M., van Dick, R., & Thompson, B. S. (2011). <i>Role theory in organizations: A relational perspective</i> . Dalam S. Zedeck (Ed.), <i>APA handbook of industrial and organizational psychology: Vol. 1. Building and developing the organization</i> (hlm. 505–534). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12169-016 .
2	Pentahelix	a. Government (Pemerintah) b. Academics (Akademisi)	Gaol, I. D. L., Sarmini, Gamaputra, G., Bisri, M. H., Nourmanita, N. A., Sari, L. N. I., & Barus, I. P. B. (2026). <i>Adaptive pentahelix collaborative governance for forest and land fire mitigation: Advancing SDGs 13 (climate</i>

²³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hal:8.

		c. Business (Dunia Usaha) d. Community (Masyarakat) e. Media	<i>action) and SDGs 15 (life on land) in East Kotawaringin, Indonesia. E3S Web of Conferences, 696, 01009. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202669601009</i>
--	--	--	--

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

lokasi penelitian yang peneliti lakukan di beberapa instansi/Lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemadam Kebakaran, LSM (WALHI Aceh), Akademisi, Media dan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti yaitu selama 2 (dua) bulan, yakni mulai dari bulan Juni-Juli 2026.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dengan pejabat yang terkait, seperti kepala dinas, staf operasional, atau petugas lapangan yang terlibat langsung dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta wawancara dengan masyarakat lokal, seperti petani atau warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran, untuk mengetahui persepsi mereka tentang upaya penanggulangan kebakaran dan sejauh mana peran pemangku kepentingan dirasakan.

3.4.2 Data Sekunder

Laporan tahunan pemangku kepentingan Kabupaten Aceh Besar mengenai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta keberhasilan atau tantangan yang

dihadapi. Rencana Aksi Daerah (RAD) atau dokumen perencanaan yang berhubungan dengan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Data statistik mengenai jumlah kebakaran, luas lahan yang terbakar, dan jumlah personel atau anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran. Artikel atau jurnal yang membahas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya yang mengkaji peran pemangku kepentingan dalam mitigasi dan penanggulangan kebakaran hutan. Penelitian sebelumnya tentang kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Aceh atau daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Laporan yang mencatat efek kebakaran terhadap ekosistem dan masyarakat di Aceh Besar, serta kontribusi pemangku kepentingan dalam pemulihan. Berita atau artikel dari media massa lokal (misalnya, surat kabar Aceh atau media online) yang membahas kebakaran hutan dan lahan di Aceh Besar serta respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan.

Wawancara atau liputan tentang kebakaran yang terjadi dan peran pemangku kepentingan dalam mengatasi bencana tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah (natural setting) dengan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan dan lingkungan penelitian.

²⁴ Hans J Schadewitz and Donald R Blevins, "A Review of the Data Collection Process," *Journal of Technical Writing and Communication* 27, no. 4 (1997): 417–24, <https://doi.org/10.2190/2GQV-964G-05UQ-V2G6>.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Proses wawancara mendalam dalam penelitian ini dilaksanakan setelah peneliti memperoleh izin penelitian serta menetapkan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Informan terdiri dari BPBD, DLH, Kepolisian, petugas pemadam kebakaran, Media, LSM, akademisi, serta Masyarakat lokal.

Sebelum wawancara dimulai, peneliti terlebih dahulu menghubungi setiap informan untuk menentukan waktu dan lokasi wawancara yang disepakati bersama. Pada saat pelaksanaan wawancara, peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta meminta persetujuan informan untuk berpartisipasi dalam wawancara. Peneliti juga menjelaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun dalam pelaksanaannya peneliti tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pengetahuannya secara lebih luas. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan (probing) untuk menggali informasi secara lebih mendalam apabila terdapat jawaban yang belum jelas, belum lengkap, atau memerlukan penjelasan lebih rinci.

Selama wawancara berlangsung, peneliti melakukan pencatatan terhadap poin-poin penting dan, dengan persetujuan informan, menggunakan alat perekam suara untuk memastikan seluruh informasi terdokumentasi secara akurat. Selain itu, peneliti juga mengamati ekspresi, sikap, dan situasi yang muncul selama proses wawancara sebagai bagian dari data pendukung yang dapat memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Setelah wawancara selesai, peneliti melakukan transkripsi terhadap hasil rekaman ke dalam bentuk teks secara lengkap. Selanjutnya, hasil transkripsi dibaca kembali dan dibandingkan dengan catatan lapangan untuk memastikan tidak terdapat informasi yang terlewat. Apabila terdapat data yang belum jelas atau memerlukan konfirmasi, peneliti melakukan klarifikasi kembali kepada informan (member checking) guna meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data.

Melalui proses wawancara mendalam tersebut, peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan, bentuk koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis bersama hasil observasi dan dokumentasi melalui proses triangulasi sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Wawancara semi-terstruktur bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga informan dapat memberikan informasi secara lebih mendalam.²⁵

²⁵ Chauncey Wilson, "Semi-Structured Interviews," in *Interview Techniques for UX Practitioners* (Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2014), 23–41, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410393-1.00002-8>.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen visual. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung yang membantu peneliti memverifikasi informasi dari para informan serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi dari instansi terkait, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, laporan kegiatan, laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan, data luas kebakaran dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk foto selama proses wawancara dan observasi lapangan, dengan tetap memperhatikan persetujuan dari informan. Dokumentasi tersebut mencakup kondisi lokasi penelitian serta kegiatan wawancara dengan para informan.

3.6 Informan Penelitian

Berikut tabel informan penelitian:

3. 2 Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
----	----------	--------

1	Masyarakat Lokal Aceh Besar	3 Orang
2	Pemadam Kebakaran Aceh Besar	1 Orang
3	BPBD Kab. Aceh Besar	1 Orang
4	DLH Kab. Aceh Besar	1 Orang
5	Kepolisian Kab. Aceh Besar	1 Orang
6	WALHI Aceh	1 Orang
7	Akademisi	1 Orang
8	Media	1 Orang
Jumlah		10 Orang

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (credibility). Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data dapat dilakukan melalui triangulasi, member check, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan.²⁶ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Menurut Moleong, triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber data untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi.²⁷ Informan dalam penelitian ini meliputi BPBD Kabupaten Aceh Besar, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Pemadam

²⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2023). Hal. 186-194.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). Hal. 330.

Kebakaran, WALHI, Media, Akademisi serta masyarakat yang terdampak atau terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu teknik saja.²⁸

3. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan dan tidak terjadi kesalahan interpretasi.²⁹

Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara deskriptif, yang berarti peneliti berusaha untuk merangkum kembali informasi yang terkumpul mengenai Peran pemangku kepentingan dalam menaggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif." Hal.191

²⁹ Sugiyono. Hal. 195

Aceh Besar.³⁰ Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).³¹ Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dicatat dan didokumentasikan secara sistematis sebagai bahan untuk proses analisis lebih lanjut.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran pemangku kepentingan serta faktor penghambat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data yang penting dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori tertentu untuk memudahkan analisis.

³⁰ A Clarke, "Qualitative Research: Data Analysis Techniques," *Professional Nurse (London, England)* 14, no. 8 (1999): 531–33.

³¹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun bagan yang sistematis. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Dalam penelitian ini, data disajikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan peran masing-masing pemangku kepentingan serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data yang telah dianalisis. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi secara terus-menerus terhadap temuan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah sekitar 2.974,12 km² dan berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh di bagian utara, Selat Malaka di sebelah timur, Kabupaten Aceh Jaya di bagian barat, serta Kabupaten Pidie di sebelah tenggara. Secara administratif, Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 kecamatan, 68 kemukiman, dan 603 gampong.³² Kondisi topografis wilayah ini didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan, terutama di bagian selatan yang merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi yang rentan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data SIPONGI KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan karhutla masih menjadi tantangan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Kabupaten Aceh Besar mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada periode musim kemarau yang panjang (hidrometeorologi kering), risiko terjadinya karhutla meningkat secara signifikan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar mencatat bahwa kejadian karhutla mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam periode dari tahun 2022 -2023 hingga terjadi

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2025* (Jantho: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2025), <https://acehbesarkab.bps.go.id>.

penurunan di tahun 2024 dan kembali meningkat di tahun 2025. Secara kumulatif, total kejadian hutan dan lahan yang terbakar selama empat tahun mencapai 419 kejadian. Tren ini menjadi latar belakang empiris yang menegaskan urgensi penelitian tentang peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi karhutla di wilayah ini.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar melibatkan berbagai stakeholder, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Media, Akademisi, organisasi lingkungan hidup, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi penting karena karhutla merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

4.1.1 Profil Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Informan terdiri dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat penegak hukum, pemadam kebakaran, media, akademisi, serta masyarakat terdampak. Tabel 4.1 berikut menyajikan profil lengkap seluruh informan penelitian.

4. 1 Profil Informan Penelitian

No	Kode	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanggal Wawancara	Metode	Jumlah
1	I1	BPBD Kabupaten Aceh Besar	Kepala Bisang Kesiap Siagaan dan Pencegahan	18 Juni 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
2	I2	Dinas Linnngkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	19 Juni 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
3	I3	Kepolisian Resor Aceh Besar (Polres)	Anggota Satuan Pembinaan Masyarakat	22 Juni 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
4	I4	Pemadam Kebakaran Damkar / Aceh Besar	Komandan Regu Pemadam	24 Juni 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
5	I5	Media Online (ANTARA)	Wartawan Perum LKBN ANTARA Biro Aceh	29 Juni 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
6	I6	WALHI Aceh (LSM Lingkungan)	Kepala Divisi PME WALHI Aceh	1 Juli 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
7	I7	Akademisi / Dosen Universitas	Dosen FISIF, UIN Ar-Raniry Banda Aceh	7 Juli 2026	Wawancara Mendalam	1 Orang
8	I8	Masyarakat Lokal	Warga Aceh Besar	3 Juli 2026 – 4 Juli 2026	Wawancara Mendalam	3 Orang
Jumlah						10 Orang

Sumber: Data Primer, Hasil Wawancara Peneliti (2026)

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Secara normatif, penanggulangan karhutla tidak hanya merupakan tugas pemadaman ketika kebakaran terjadi. Penanggulangan mencakup kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan pascakebakaran. Oleh sebab itu, ekspektasi peran terhadap stakeholder harus ditempatkan dalam keseluruhan siklus tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepolisian Resor Aceh Besar, Pemadam Kebakaran, WALHI Aceh, media, akademisi, serta masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung masing-masing informan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

4.2.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap seluruh informan penelitian, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) di Kabupaten Aceh Besar. Analisis peran dalam penelitian ini mengacu pada tujuh indikator teori peran. Ketujuh indikator tersebut dianalisis secara mendalam berdasarkan data primer yang diperoleh dari lapangan.

4.2.1.1 Peran yang Diharapkan (Role Expectations)

Role expectations menunjukkan harapan yang melekat pada suatu posisi mengenai bagaimana aktor seharusnya menjalankan perannya. Dalam konteks penanggulangan karhutla, harapan tersebut tidak hanya berasal dari tugas formal masing-masing lembaga, tetapi juga dari kebutuhan stakeholder lain terhadap kontribusi aktor tersebut.

Pada unsur Government, BPBD Kabupaten Aceh Besar mempunyai ekspektasi sebagai koordinator utama dalam pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan koordinasi penanggulangan bencana. Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan I-1 BPBD:

*"Yang pertama kita sebelum ada musibah, kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa dilarang membakar hutan. Itu langkah pertama, langkah awal kita bekerjasama dengan pihak kehutanan, walaupun kehutanan kita tidak ada di sini tapi dengan pihak yang berwajib."*³³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap Government tidak berhenti pada tindakan pemadaman ketika kebakaran terjadi. BPBD memahami adanya tuntutan peran pada tahap pra-bencana melalui sosialisasi, pencegahan, dan koordinasi dengan pihak lain. Dengan demikian, Government mempunyai *role expectations* yang relatif jelas karena didukung oleh mandat kelembagaan dan regulasi.

Pada unsur Community, WALHI Aceh menjalankan posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil. Ekspektasi terhadap Community tidak berbentuk kewenangan formal

³³ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Besar

seperti pemerintah, tetapi lebih diarahkan pada fungsi pengawasan, advokasi, penyediaan informasi, serta penyampaian data mengenai lokasi rawan kebakaran. Informan I-6 WALHI Aceh menyampaikan:

*"Peranan WALHI selaku bagian daripada masyarakat sipil ya hanya sebatas mengawasi mungkin, atau memberikan saran kepada pemerintah, memberikan data-data perusahaan. Bahkan kalau WALHI sebenarnya punya juga data lokasi-lokasi yang dia rawan terjadi kebakaran."*³⁴

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Community mempunyai ekspektasi peran sebagai pengawas sekaligus penyedia informasi alternatif bagi pemerintah. Peran tersebut penting karena masyarakat sipil mempunyai kedekatan dengan kondisi lapangan yang dapat memperkaya informasi pemerintah.

Pada unsur Academics, ekspektasi perannya berkaitan dengan penyediaan pengetahuan, penelitian, rekomendasi kebijakan, edukasi, serta inovasi yang dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan karhutla. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi tersebut dengan mekanisme pelibatan akademisi.

Informan I-7 akademisi menyatakan:

*"Keterlibatan akademisi dalam penanggulangan karhutla selama ini lebih bersifat individual dan ad hoc, bukan merupakan bagian dari mekanisme koordinasi yang terstruktur. Akademisi belum dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan penanggulangan karhutla tingkat kabupaten, padahal kajian-kajian ilmiah yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan berbasis bukti."*³⁵

³⁴ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

³⁵ Wawancara Informan 7 Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara substantif terdapat ekspektasi terhadap akademisi, tetapi ekspektasi tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam mekanisme kelembagaan.

Media memiliki ekspektasi sebagai penyampai informasi, edukator publik, serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Informan I-5 dari ANTARA menjelaskan:

“Kami biasanya memberi himbauan kepada masyarakat kolaborasi dengan pemerintah dengan cara meminjam pemangku kepentingan lain seperti BPBD, dan biasanya kami memberikan edukasi itu setelah banyak kejadian agar tidak terulang dan berlanjut. Karena peran kami disini tidak hanya fokus karhutla tapi banyak berita lain.”³⁶

Hal tersebut memperlihatkan bahwa media menerima ekspektasi sebagai penyebarluasan informasi dan edukasi. Namun, keterlibatan media masih bersifat situasional karena belum terdapat kerja sama khusus yang bersifat permanen.

Jika keempat unsur tersebut dibandingkan, terlihat adanya perbedaan tingkat kejelasan ekspektasi peran. Government memiliki ekspektasi yang paling jelas karena memiliki mandat formal. Community memiliki ekspektasi sebagai pengawas dan pemberi informasi, sedangkan Academics dan Media mempunyai fungsi pendukung yang belum sepenuhnya dilembagakan.

Dengan demikian, persoalan utama pada indikator *role expectations* bukan tidak adanya peran, melainkan ketidakseimbangan tingkat pelembagaan ekspektasi antarunsur Pentahelix. Government mempunyai ekspektasi yang bersifat formal, sedangkan

³⁶ Wawancara Informan I-5, Wartawan Perum LKBN ANTARA Biro Aceh

Community, Academics, dan Media lebih banyak menjalankan peran berdasarkan fungsi sosial dan profesional masing-masing.

4.2.1.2 Perilaku Peran (Role Behavior)

Indikator kedua adalah perilaku peran (role behavior), yang merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya.

BPBD menunjukkan perilaku peran melalui pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Informan I-1 menjelaskan:

*"Yang kedua mungkin kita pada saat musim kemarau, hidrometeorologi kering, kita melakukan pemantauan di titik-titik rawan kebakaran. Pertama misalnya kalau kita di sini wilayah Selawah, walaupun kita karena berjalan di jalan besarnya, tapi kan kita bisa memantau titik-titiknya."*³⁷

Perilaku tersebut menunjukkan bahwa Government telah menjalankan fungsi deteksi dini. Namun, pemantauan yang masih mengandalkan akses jalan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran juga dipengaruhi oleh keterbatasan geografis.

Perilaku Community terlihat melalui pengawasan, penyediaan data, dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Masyarakat lokal menyatakan:

*"Kalau masyarakat melihat ada asap atau api biasanya langsung melapor ke aparat gampong atau menghubungi petugas supaya cepat ditangani."*³⁸

Perilaku tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis sebagai *first responder* karena berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

Perilaku akademisi belum menunjukkan keterlibatan yang konsisten dalam mekanisme penanggulangan. Informan I-7 menyatakan:

³⁷ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Besar

³⁸ Wawancara Informan I-8, Masyarakat Lokal Aceh Besar

“Sebenarnya kalau kita lihat keterlibatan akademisi dalam hal ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terstruktur, jadi geraknya baru muncul saat ada kepentingan atau kasus tertentu saja.”³⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku akademisi belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kelembagaan pemerintah. Pengetahuan akademik tersedia, tetapi pemanfaatannya dalam proses kebijakan belum berlangsung secara sistematis.

Media menjalankan perilaku peran melalui pemberitaan, penyampaian imbauan, dan edukasi masyarakat. Informan I-5 menjelaskan bahwa:

“Media melakukan edukasi dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan menggunakan stakeholder seperti BPBD sebagai sumber informasi.”⁴⁰

Dengan demikian, Media telah melakukan perilaku peran sesuai fungsinya, tetapi sifatnya belum berkelanjutan dan lebih banyak muncul ketika terdapat kejadian atau kebutuhan pemberitaan.

Perbandingan keempat unsur menunjukkan bahwa Government dan Community memiliki perilaku peran yang lebih nyata dalam kegiatan lapangan. Akademisi lebih banyak berada pada posisi potensial sebagai penyedia pengetahuan, sementara Media menjalankan fungsi informasi secara situasional.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku aktual belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan Pentahelix, karena aktivitas operasional masih lebih banyak bertumpu pada Government dan Community.

³⁹ Wawancara Informan I-7 Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁴⁰ Wawancara Informan I-5 Wartawan Perum LKBN ANTARA Biro Aceh

4.2.1.3 Kesesuaian Peran (Role Congruence)

Indikator ketiga adalah kesesuaian peran (role congruence), yang mengukur sejauh mana perilaku nyata para pemangku kepentingan sesuai dengan harapan dan tuntutan peran yang telah ditetapkan.

BPBD menunjukkan kesesuaian peran yang cukup kuat ketika terjadi kebakaran.

Informan I-1 menjelaskan:

*"Kita dengan aparat pihak terkait, kita sering kolaborasi apalagi ada musibah. Kita datang bersama-sama pihak dari pertahanan, dari pihak polisi yang ada datang, dan pihak lain juga ada datang, karena kita ada pemantauan DLH. Karena mereka bisa mengetahui pencemaran udara melalui alatnya. Jadi informasinya cepat di sampaikan dan kita menginformasikan ke pemadam untuk penanganan."*⁴¹

Kutipan tersebut menunjukkan adanya hubungan Kolaborasi antara BPBD, Kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan kesesuaian peran yang cukup baik dalam fase darurat.

Kesesuaian peran Community terlihat dari hubungan antara fungsi pengawasan WALHI dengan kebutuhan pemerintah terhadap informasi lapangan. Informan I-6 WALHI Aceh memberikan pandangannya:

*"Sebenarnya kami juga ada data karhutla dan kami memberikan data lokasi rawan kebakaran serta data perusahaan kepada pemerintah."*⁴²

Pernyataan tersebut mengkonfirmasi Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku Community sesuai dengan fungsi yang diharapkan, yaitu memberikan pengawasan dan informasi yang dapat digunakan pemerintah.

⁴¹ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD aceh Besar

⁴² Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

Kesesuaian peran Academics masih terbatas. Secara normatif akademisi diharapkan memberikan kajian ilmiah sebagai dasar kebijakan, tetapi informan I-7 menyatakan bahwa:

“Sebenarnya akademisi belum dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kebijakan kabupaten.”⁴³

Artinya, terdapat kesenjangan antara fungsi yang seharusnya diberikan oleh Academics dengan ruang aktual yang tersedia bagi mereka.

Media memiliki kesesuaian peran ketika memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah. Namun, karena kerja sama belum terstruktur, kesesuaian tersebut masih bersifat situasional. Informan I-5 menyatakan bahwa:

“Kami memberikan edukasi biasanya dilakukan setelah banyak kejadian agar tidak terulang.”

Keempat unsur menunjukkan tingkat kesesuaian yang berbeda. Government mempunyai kesesuaian paling kuat pada fase darurat karena terdapat kebutuhan koordinasi yang langsung. Community juga menunjukkan kesesuaian melalui pengawasan dan pelaporan. Sebaliknya, Academics belum memperoleh ruang yang memadai untuk menghubungkan pengetahuan dengan kebijakan, sedangkan Media belum terintegrasi secara formal.

Dengan demikian, kesesuaian peran dalam sistem Pentahelix Aceh Besar bersifat kuat pada fungsi respons tetapi lebih lemah pada fungsi pencegahan dan perencanaan.

⁴³ Wawancara Informan I-7 Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4.2.1.4 Peran yang Diterima (Role Acceptance)

Peran yang diterima (*role acceptance*) mengacu pada sejauh mana setiap pemangku kepentingan menerima, memahami, dan bersedia melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang melekat pada posisinya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penerimaan terhadap peran menjadi aspek penting karena akan memengaruhi komitmen, tanggung jawab, serta kualitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I-2 DLH Aceh Besar dijelaskan bahwa:

*"Kami memahami bahwa DLH memang bertugas melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan, termasuk melakukan pemantauan terhadap kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Ketika ditemukan indikasi tertentu, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar penanganan dapat segera dilakukan."*⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya penerimaan perannya sebagai instansi yang berfokus pada aspek perlindungan dan pengawasan lingkungan. Penerimaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan kualitas lingkungan, serta penyampaian informasi kepada instansi yang memiliki kewenangan operasional dalam penanganan kebakaran.

Community juga menerima perannya. WALHI I-6 bahkan menjelaskan bahwa:

*"Secara kelembagaan yang di luar pemerintah, seperti masyarakat sipil ini, dia sebenarnya secara kewajiban karena memang bukan tugasnya dia, maka kadang-kadang yang seharusnya itu tugasnya pemerintah dibackup oleh teman-teman CSO."*⁴⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan penerimaan peran yang cukup tinggi, bahkan sampai pada kesediaan membantu ketika terdapat kekosongan kapasitas pemerintah.

⁴⁴ Wawancara Informan 2, KASI Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLH Aceh Besar

⁴⁵ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

Academics menerima pentingnya kontribusi ilmiah, tetapi penerimaan tersebut belum diikuti dengan keterlibatan kelembagaan yang kuat. Informan I-7 menegaskan bahwa:

“Kajian akademik dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi akademisi belum dilibatkan secara aktif.”⁴⁶

Media menerima perannya sebagai penyampai informasi dan edukasi. Informan I-5 menjelaskan bahwa:

“Peran kami lebih kepada melakukan pencegahan melalui imbauan kepada masyarakat dengan kolaborasi dengan pemerintah.”⁴⁷

Keempat unsur menunjukkan adanya penerimaan terhadap peran. Persoalan yang muncul bukan terutama penolakan terhadap peran, tetapi ketidakseimbangan kapasitas dan ruang kelembagaan untuk menjalankan peran tersebut.

Hal ini penting karena menunjukkan bahwa rendahnya integrasi Pentahelix tidak dapat semata-mata dijelaskan oleh kurangnya kemauan stakeholder. Pada Academics dan Media, misalnya, terdapat kesediaan untuk berkontribusi, tetapi belum terdapat mekanisme formal yang secara konsisten menghubungkan mereka dengan sistem penanggulangan karhutla.

4.2.1.5 Peran yang Ditegaskan (Role Clarity)

Peran yang ditegaskan (*role clarity*) berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan. Kejelasan peran menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan

⁴⁶ Wawancara Informan I-7 Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁴⁷ Wawancara Informan I-5 Wartawan Perum LKBN ANTARA Biro Aceh

maupun kesenjangan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan pemangku kepentingan menyatakan bahwa secara normatif pembagian tugas antarinstansi telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,⁴⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016,⁴⁹ serta berbagai ketentuan teknis lainnya. Namun, dalam praktiknya koordinasi di lapangan masih sangat bergantung pada komunikasi antarinstansi.

Informan I-1 BPBD Aceh Besar menjelaskan bahwa:

"Kalau tugas masing-masing sebenarnya sudah jelas. BPBD sebagai koordinator ketika terjadi bencana, kemudian Damkar melakukan pemadaman, kepolisian melakukan pengamanan dan penyelidikan, sementara DLH lebih kepada pengawasan lingkungan."⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada unsur Government pembagian tugas secara normatif sudah relatif jelas.

Pada Community, kejelasan peran lebih bersifat fungsional. WALHI memahami dirinya sebagai pihak yang melakukan pengawasan, memberikan data, serta memberikan saran kepada pemerintah.

Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya mempunyai kedudukan formal dalam mekanisme koordinasi pemerintah daerah.

⁴⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana" (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>.

⁴⁹ "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan."

⁵⁰ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Besar

Akademisi menunjukkan bahwa masalah utama bukan lagi sekadar pembagian tugas, tetapi keberlanjutan koordinasi. Informan I-7 menyatakan:

*"Yang menjadi tantangan bukan lagi pembagian tugas, tetapi bagaimana semua pihak mampu menjalankan fungsi koordinasi secara berkelanjutan sebelum kebakaran terjadi."*⁵¹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan peran antar stakeholder pada dasarnya telah dipahami oleh seluruh pihak. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan peran masih dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, pertukaran informasi, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, kejelasan peran perlu diikuti oleh penguatan mekanisme kolaborasi agar tidak hanya berhenti pada pembagian tugas secara administratif.

Pada Media, kejelasan peran sebagai penyebar informasi sudah dipahami. Namun, Media I-5 menyatakan:

"Kita kalau kita sering banyak kejadian atau mau edukasi tidak ada kolaborasi khusus atau pemangku kepentingan kerja sama kami"

Artinya, Media memahami fungsinya, tetapi hubungan kelembagaan dengan pemerintah belum jelas dan belum terstruktur.

Temuan menunjukkan adanya perbedaan antara kejelasan tugas dan kejelasan mekanisme hubungan antaraktor. Government relatif jelas secara formal, sedangkan Community, Academics, dan Media memahami fungsi masing-masing tetapi belum memiliki posisi yang kuat dalam mekanisme koordinasi.

⁵¹ Wawancara Informan 7, Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian, masalah role clarity di Aceh Besar bukan semata-mata tidak adanya pembagian tugas, melainkan belum jelasnya mekanisme kolaborasi lintas Pentahelix dalam menjalankan tugas tersebut secara bersama-sama.

4.2.1.6 Peran yang Dilaksanakan (Role Performance)

Peran yang dilaksanakan (role performance) merupakan bentuk implementasi nyata dari tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing stakeholder dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pada indikator ini peneliti menganalisis sejauh mana aktivitas yang dilakukan stakeholder telah sesuai dengan fungsi yang dimiliki.

Government menunjukkan performa paling nyata. Berdasarkan hasil wawancara, BPBD secara rutin melaksanakan patroli, pemetaan daerah rawan, koordinasi lintas sektor, serta mengoordinasikan penanganan ketika terjadi kebakaran. Pemadam Kebakaran menjalankan fungsi operasional pemadaman di lokasi kejadian, sedangkan Kepolisian melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran lahan.

Performa Community terlihat dari pelaporan dini masyarakat. Informan I-8 menjelaskan:

"Kalau masyarakat melihat ada asap atau api biasanya langsung melapor ke aparat gampong atau menghubungi petugas supaya cepat ditangani."⁵²

Media juga menjalankan perannya dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan kejadian karhutla serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya pembakaran lahan. WALHI juga menunjukkan performa melalui

⁵² Wawancara Informan 8, Masyarakat Lokal Aceh Besar

pengawasan, penyediaan data, dan advokasi. Dengan demikian, Community bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga berkontribusi dalam proses deteksi dan pengawasan.

Performa Academics masih belum optimal. Informan I-7 menyatakan:

“Keterlibatan akademisi masih sendiri-sendiri dan tidak berkelanjutan, serta belum terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan kabupaten.”⁵³

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas akademik yang tersedia dengan pemanfaatannya dalam sistem penanggulangan karhutla.

Media menjalankan performa melalui penyampaian imbauan, pemberitaan, dan edukasi publik. Informan I-5 menyatakan:

“Kami biasanya memberi himbauan kepada masyarakat kolaborasi dengan pemerintah dengan cara meminjam pemangku kepentingan lan seperti BPBD, karena kami berbicara fakta sehingga dengan cara itu meperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berita yang kami sampaikan.”⁵⁴

Namun, performa tersebut masih bersifat situasional karena Media bukan bagian dari struktur koordinasi formal penanggulangan karhutla.

Jika dibandingkan, Government memiliki role performance paling kuat, terutama pada fase respons. Community menunjukkan performa yang cukup aktif melalui pelaporan dan pengawasan. Media menjalankan fungsi komunikasi, sedangkan Academics belum mampu mengubah kapasitas pengetahuan menjadi kontribusi kelembagaan yang konsisten.

⁵³ Wawancara Informan 7, Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁵⁴ Wawancara Informan 5 Media, Wartawan Perum LKBN (ANTARA Biro Aceh)

Temuan ini menunjukkan bahwa performa sistem masih terkonsentrasi pada Government dan Community, sedangkan Academics dan Media belum sepenuhnya memberikan kontribusi sesuai potensi Pentahelix.

4.2.1.7 Peran yang Terhambat (Role Delay or Role Conflict)

Indikator terakhir dalam teori peran adalah role delay or role conflict, yaitu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan peran tidak dapat berjalan secara optimal. Government menghadapi hambatan teknis dan geografis. Informan I-1 BPBD menjelaskan:

*"Mungkin kalau faktor itu medan tempuhnya kita. Kalau misalnya ada kebakaran di Seulawah, kalau dengan kendaraan kita tidak bisa karena jalur tempuhnya. Mungkin kalau kita pakai jalan darat, pakai jalan kaki, tidak sanggup kita ke tempat lain. Dan pun jauhnya itu medannya terkenal bagi kita."*⁵⁵

Selain itu, informan I-4 Pemadam Kebakaran Aceh Besar menyampaikan bahwa:

*"Akses menuju lokasi kebakaran sering kali menjadi kendala karena sebagian besar titik kebakaran berada di kawasan pegunungan maupun hutan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam."*⁵⁶

Selain hambatan teknis, Government menghadapi hambatan pada tahap investigasi pascakebakaran. WALHI I-6 menyatakan:

*"Gak ada pengawasan, gak ada penindakan. Jadi kadang-kadang terjadi kebakaran, tapi pas kebakaran itu tidak ada tindak lanjut seperti apa, diinvestigasikan atau tidak. Itu kan gak pernah terjadi. Hanya sebatas terjadi kebakaran, turun tim, melakukan penanganan, pemadaman api, selesai. Seharusnya setelah pemadaman, penyebabnya kenapa? Kondisi alami? Atau memang terbakar? Hal-hal seperti itu perlu diinvestigasi."*⁵⁷

Hal ini menunjukkan adanya role delay karena fungsi respons telah dilakukan, tetapi fungsi investigasi dan penegakan hukum belum berjalan secara konsisten.

⁵⁵ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Besar

⁵⁶ Wawancara Informan 4, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Aceh Besar

⁵⁷ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

Community mengalami hambatan yang berbeda. WALHI I-6 menyatakan:

“Masyarakat sipil terkadang harus membantu menjalankan fungsi yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah.”⁵⁸

Kondisi tersebut menunjukkan adanya role substitution, yaitu ketika aktor masyarakat sipil mengisi kekosongan peran yang belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh aktor formal.

Hambatan Academisi terutama berupa tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur. Keterlibatan akademisi masih bersifat individual dan ad hoc, sehingga pengetahuan yang dimiliki belum masuk secara konsisten ke dalam proses kebijakan.

Dengan demikian, role delay pada Academics terjadi pada tahap integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan.

Media mengalami hambatan berupa belum adanya kerja sama khusus dengan pemerintah. BPBD menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai media khusus atau kerja sama media, sementara media biasanya hadir ketika terdapat kejadian atau kegiatan edukasi.

Akibatnya, Media cenderung menjalankan perannya setelah terjadi peristiwa atau ketika pemerintah membutuhkan penyebaran informasi.

Berdasarkan keempat unsur Pentahelix, hambatan peran mempunyai bentuk yang berbeda. Government mengalami hambatan akses geografis, sarana, serta investigasi pascakebakaran. Community mengalami role substitution, Academics mengalami

⁵⁸ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

keterlambatan integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan, sedangkan Media mengalami keterlambatan karena belum adanya mekanisme kerja sama formal.

Dengan demikian, *role delay* dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat dipahami hanya sebagai keterlambatan individu atau lembaga, tetapi sebagai masalah sistemik yang muncul karena belum terintegrasinya peran antarunsur Pentahelix dalam seluruh siklus penanggulangan karhutla.

Berdasarkan analisis pada tujuh indikator Teori Peran, dapat disimpulkan bahwa setiap unsur Pentahelix mempunyai karakteristik peran yang berbeda.

Government memiliki peran paling dominan karena memiliki mandat formal, struktur kelembagaan, serta kewenangan operasional. Hal ini menjadikan Government sebagai unsur dengan *role expectations*, *role clarity*, dan *role performance* yang relatif paling kuat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa BPBD menjadi *lead agency* dalam respons karhutla.

Community menunjukkan peran yang relatif aktif, terutama dalam pengawasan, penyediaan data, dan pelaporan dini. Bahkan, keterlibatan WALHI dan masyarakat dapat menjadi pelengkap kapasitas pemerintah. Namun, ketika Community harus menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan pemerintah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam sistem.

Academisi mempunyai potensi penting sebagai penyedia pengetahuan dan rekomendasi berbasis riset, tetapi keterlibatannya masih bersifat individual dan *ad hoc*. Kondisi ini menyebabkan kapasitas akademik belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan.

Media telah menjalankan fungsi penyebaran informasi dan edukasi publik, tetapi keterlibatannya masih bersifat situasional. Tidak adanya kerja sama media khusus menunjukkan bahwa Media belum sepenuhnya menjadi bagian dari mekanisme koordinasi formal.

Sementara itu, unsur Business tidak dimasukkan sebagai aktor yang aktif dalam analisis empiris karena berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar. Dalam tabel pemetaan Pentahelix penelitian, unsur Business memang tidak memiliki aktor maupun bentuk keterlibatan yang teridentifikasi. Kondisi tersebut merupakan temuan penting yang menunjukkan bahwa penerapan Pentahelix belum berjalan secara utuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara seimbang. Government dan Community merupakan unsur yang paling terlihat dalam pelaksanaan lapangan, sedangkan Academics dan Media telah memiliki kontribusi tetapi belum terintegrasi secara sistematis. Business bahkan belum menunjukkan keterlibatan dalam sistem yang diteliti.

Jika dikaitkan dengan Teori Peran, ketidakseimbangan tersebut terjadi karena tidak semua unsur mempunyai tingkat *role expectations*, *role clarity*, *role behavior*, dan *role performance* yang sama. Government mempunyai struktur peran yang paling kuat, sedangkan unsur lainnya masih lebih banyak menjalankan peran berdasarkan inisiatif dan fungsi masing-masing.

Dengan demikian, persoalan utama penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar bukan hanya mengenai siapa yang berperan, tetapi juga bagaimana peran tersebut dihubungkan, dikoordinasikan, dan dilembagakan dalam satu sistem kolaboratif. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan Pentahelix harus dilakukan dengan memperkuat dimensi peran pada masing-masing stakeholder, bukan hanya dengan menambah jumlah aktor yang terlibat.

4.2.3 Faktor Penghambat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Faktor-faktor penghambat ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

4.2.3.1 Faktor Teknis dan Infrastruktur

Hambatan teknis yang paling dominan adalah keterbatasan aksesibilitas geografis ke kawasan-kawasan rawan karhutla. Sebagaimana dijelaskan oleh informan I-1:

*"Mungkin kalau faktor penghambat itu medan tempuhnya kita. Kalau misalnya ada kebakaran di Seulawah, kalau dengan kendaraan kita tidak bisa karena jalur tempuhnya. Mungkin kalau kita pakai jalan darat, pakai jalan kaki, tidak sanggup kita ke tempat lain. Dan pun jauhnya itu medannya terkenal bagi kita."*⁵⁹

Keterbatasan aksesibilitas medan ini merupakan hambatan struktural yang sulit diatasi dalam jangka pendek dan memerlukan investasi infrastruktur jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan respons sangat bergantung pada deteksi dini dan mobilisasi sumber daya lokal yang berada di dekat lokasi kejadian.

⁵⁹ Wawancara Informan 1, KABID Kesiap Siagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Besar

Selain itu, keterbatasan peralatan pemadaman dan sarana transportasi khusus juga menjadi hambatan yang nyata. Meskipun dukungan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas dasar sudah tersedia, kapasitas peralatan yang ada belum memadai untuk menghadapi kejadian karhutla berskala besar di kawasan terpencil. Hal ini dikonfirmasi oleh informan I-4 yang menyatakan bahwa:

*“Keterbatasan alat merupakan salah satu alasan utama mengapa aparat tidak dapat bergerak secara maksimal dalam penanganan karhutla.”*⁶⁰

4.2.3.2 Faktor Kelembagaan dan Regulasi

Hambatan kelembagaan yang paling krusial adalah lemahnya mekanisme investigasi dan penegakan hukum pasca-kebakaran. Ketiadaan tindak lanjut hukum terhadap pelaku pembakaran menciptakan kondisi impunitas yang meminimalkan efek jera dan membiarkan siklus pembakaran berulang setiap musim kemarau. I-6 secara kritis menyoroti:

*“Seharusnya kan hal-hal seperti itu kan perlu diinvestigasi atau didalami paling penting. Nah siapa kemudian kewenangannya mendalami ini? Kepolisian dia ada kewenangan, DLHK ada kewenangan. Tapi apa tidak ada peningkatan hukum? Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan informasi bagaimana investigasi dilakukan oleh pemerintah pasca terjadi kebakarannya.”*⁶¹

Kondisi ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola lingkungan (Environmental Governance) yang lebih luas, di mana instrumen hukum tersedia tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten. I-6 melanjutkan:

*“Karena kondisi gak ada investigasi seperti itu, pelaku ini kan gak ada efek jera. Kalau seandainya itu ditertibkan, betul-betul ditindak, maksudnya akan berkurang. Karena lokasi-lokasi yang merisakan atau punya rawan terjadi kebakaran itu ada semua di pemerintahan.”*⁶²

⁶⁰ Wawancara Informan 4, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Aceh Besar

⁶¹ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

⁶² Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

Pernyataan ini mengungkap adanya kesenjangan antara kewenangan formal yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dengan pelaksanaan aktual kewenangan tersebut. Aparat memiliki kapasitas hukum untuk melakukan investigasi, namun kapasitas ini tidak dimanfaatkan secara konsisten, sehingga peran penegakan hukum menjadi terhambat (role delay) dalam siklus penanggulangan karhutla.

Selain itu, lemahnya mekanisme investigasi pasca-kejadian dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Informan I-7 Akademisi mengkritisi kondisi ini dengan sangat tajam:

*"Gak ada pengawasan, gak ada penindakan. Jadi kadang-kadang terjadi kebakaran, tapi pas kebakaran itu tidak ada tindak lanjut seperti apa, diinvestigasikan atau tidak. Itu kan gak pernah terjadi. Hanya sebatas terjadi kebakaran, turun tim, melakukan penanganan, pemadaman api, selesai. Seharusnya setelah pemadaman, penyebabnya kenapa? Kondisi alami? Atau memang terbakar? Hal-hal seperti itu perlu diinvestigasi."*⁶³

Hambatan kelembagaan lainnya adalah belum terformalisasinya mekanisme koordinasi lintas sektor yang mengikat. Saat ini, koordinasi antara BPBD, DLH, Polri, Damkar, media, LSM, dan akademisi masih bersifat informal dan situasional, bergantung pada inisiatif personal dan hubungan interpersonal antar pejabat. Ketiadaan Protokol Koordinasi Multi-Stakeholder yang terstandarisasi mengakibatkan respons yang tidak konsisten antarperiode dan antarwilayah kejadian.

4.2.3.3 Faktor Sosial dan Budaya

Hambatan sosial-budaya yang paling signifikan adalah masih adanya praktik pembakaran lahan untuk tujuan pembukaan areal pertanian yang dianggap lebih efisien

⁶³ Wawancara Informan 7, Akademisi, Dosen FISIP UIN AR-Raniry Banda Aceh

dan ekonomis oleh sebagian masyarakat. I-6 WALHI mengkritisi kondisi ini dengan sangat tajam:

*"Gak ada pengawasan, gak ada penindakan. Jadi kadang-kadang terjadi kebakaran, tapi pas kebakaran itu tidak ada tindak lanjut seperti apa, diinvestigasikan atau tidak. Itu kan gak pernah terjadi. Hanya sebatas terjadi kebakaran, turun tim, melakukan penanganan, pemadaman api, selesai. Seharusnya setelah pemadaman, penyebabnya kenapa? Kondisi alami? Atau memang terbakar? Hal-hal seperti itu perlu diinvestigasi."*⁶⁴

Hambatan sosial lainnya adalah rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap dampak jangka panjang dari praktik land clearing melalui pembakaran. Akademisi I-7 merekomendasikan bahwa pemerintah perlu lebih proaktif dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha:

*"Pemerintah memang harus proaktif, harus proaktif untuk memberikan penyadaran bagi masyarakat dan pelaku usaha. Mereka melarang tapi tidak memberikan pemahaman cara land clearing selain dengan metode bakar. Karena kebanyakan pelaku usaha dan masyarakat itu dia melakukan land clearing atau pembukaan lahan itu melalui pembakaran."*⁶⁵

4.3 Pembahasan

Berdasarkan seluruh temuan yang telah disajikan dalam sub-bab sebelumnya, pembahasan dalam bagian ini akan mengintegrasikan analisis berdasarkan Teori Peran.⁶⁶ Selain itu, peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar juga dianalisis menggunakan kerangka Model Pentahelix yang melibatkan lima elemen utama: Government (Pemerintah), Academics (Akademisi), Business (Dunia Usaha), Community (Masyarakat), dan Media.⁶⁷ Analisis ini bertujuan untuk

⁶⁴ Wawancara Informan 6, KADIV PME WALHI Aceh

⁶⁵ Wawancara Informan 7, Akademisi, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁶⁶ Thompson, "ROLE THEORY IN ORGANIZATIONS: A RELATIONAL PERSPECTIVE."

⁶⁷ Devian et al., "Adaptive Pentahelix Collaborative Governance for Forest and Land Fire Mitigation : Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin , Indonesia."

mengidentifikasi tingkat sinergi antar elemen, mengungkap celah kolaborasi yang perlu diperkuat dan menjawab rumusan masalah yang ada di BAB I.

4.3.1 Pembahasan Berdasarkan Teori Peran

Penerapan ketujuh indikator teori peran terhadap data empiris penelitian mengungkap gambaran yang kompleks tentang dinamika peran pemangku kepentingan dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar. Ketujuh dimensi peran tersebut diuraikan secara naratif berikut ini, dengan membandingkan kondisi ideal secara normatif dan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

Pada dimensi *role expectations*, kondisi ideal menghendaki agar setiap aktor memiliki ekspektasi peran yang jelas berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Dalam kondisi empiris di Kabupaten Aceh Besar, BPBD telah dipahami secara luas sebagai koordinator utama, namun ekspektasi peran terhadap DLH, Polri, dan LSM masih bersifat implisit dan belum terlembagakan dalam protokol tertulis. Pada dimensi *role behavior*, idealnya perilaku nyata aktor mencerminkan ekspektasi peran yang telah ditetapkan; namun secara empiris, BPBD hanya aktif secara optimal pada fase tanggap darurat, sementara upaya preventif belum berjalan konsisten, meskipun partisipasi masyarakat sebagai *first responder* cukup menonjol. Selanjutnya pada dimensi *role congruence*, kondisi ideal mensyaratkan peran antaraktor saling melengkapi dalam satu sistem yang koheren. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kesesuaian peran antara BPBD, TNI, dan Polri sudah cukup baik pada saat darurat, tetapi kesesuaian dengan LSM dan akademisi masih bersifat *ad hoc* dan situasional.

Pada dimensi *role acceptance*, secara normatif seluruh aktor idealnya menerima dan menginternalisasi perannya dalam system. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan

peran yang tinggi secara normatif oleh semua pihak, namun kapasitas aktual untuk melaksanakan peran tersebut masih terbatas oleh keterbatasan anggaran dan peralatan. Pada dimensi role clarity, idealnya batas dan cakupan peran masing-masing aktor dipahami dengan jelas; namun dalam praktiknya, batas peran antara BPBD dan DLH pada fase rehabilitasi masih tumpang tindih, dan posisi LSM belum memiliki payung regulasi yang jelas dalam protokol kabupaten.

Pada dimensi role performance, kondisi ideal menghendaki agar aktor melaksanakan perannya secara optimal dan terukur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa performa peran sudah optimal pada fase darurat, tetapi masih sub-optimal pada fase pencegahan dan rehabilitasi akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur dan teknologi. Terakhir, pada dimensi role delay/role conflict, idealnya tidak terdapat konflik maupun keterlambatan dalam pelaksanaan peran; namun secara empiris ditemukan adanya role delay dalam proses investigasi penyebab karhutla, role conflict antara fungsi pemadaman (BPBD) dan penegakan hukum (Polri) pascakejadian, serta fenomena role substitution yang dilakukan oleh LSM untuk mengisi kekosongan peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sistem penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya seimbang. Kekuatan sistem terkonsentrasi pada fase darurat (respons), sementara fase pencegahan dan rehabilitasi masih memerlukan penguatan kapasitas yang signifikan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Budiningsih yang mengidentifikasi bahwa pengendalian karhutla di provinsi Sumatra Selatan secara umum masih lebih bersifat reaktif daripada proaktif.⁶⁸

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perluasan penting yaitu efektivitas koordinasi tersebut ternyata tidak cukup ditopang oleh kejelasan mandat kelembagaan semata (role clarity), melainkan juga sangat ditentukan oleh dimensi role congruence dan role performance yang bersifat lebih dinamis dan situasional.

Sejalan dengan itu, temuan mengenai lemahnya mekanisme investigasi dan penegakan hukum pascakejadian pada penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian Rizana di Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.⁶⁹

Sementara itu, temuan penelitian ini mengenai kesenjangan antara ketersediaan instrumen regulasi dengan efektivitas implementasinya juga sejalan dengan hasil penelitian Novita Dewi, Sandria, dan Sandira Hatmini, mengenai upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani kasus kebakaran hutan berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang menemukan bahwa kerangka regulasi baik pada tingkat nasional maupun regional belum sepenuhnya efektif menekan angka kejadian karhutla akibat lemahnya mekanisme penegakan di tingkat pelaksana.⁷⁰ Konsistensi temuan lintas penelitian pada berbagai level pemerintahan ini, mulai dari kabupaten,

⁶⁸ Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan."

⁶⁹ Vitas, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Indragilir Provinsi Riau."

⁷⁰ Novita Dewi, Sandria, and Santi Hatmini, "Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan Riau Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution."

provinsi, hingga kerja sama regional ASEAN, memperkuat argumen bahwa akar persoalan karhutla di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Besar, terletak lebih pada kesenjangan implementasi dan ketimbang kekosongan regulasi.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut terletak pada penggunaan lensa teori peran yang lebih granular, yaitu tujuh dimensi, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi secara lebih spesifik pada dimensi peran mana persoalan tersebut sesungguhnya berada, yakni pada *role delay/role conflict*, bukan pada *role expectations* maupun *role clarity*. Kontribusi ini memberikan pemahaman yang lebih presisi dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menyimpulkan kelemahan penegakan hukum secara umum tanpa memetakan pada dimensi peran spesifik mana kelemahan tersebut paling menonjol.

4.3.2 Pembahasan Berdasarkan Model Pentahelix

Analisis menggunakan Model Pentahelix mengungkap bahwa implementasi kolaborasi multi-aktor dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar masih bersifat tidak seimbang. Dari kelima elemen Pentahelix, hanya Government dan Community yang menunjukkan keterlibatan yang aktif dan konsisten, sementara elemen Academics, Business, dan Media belum terintegrasi secara optimal dalam sistem penanggulangan karhutla.

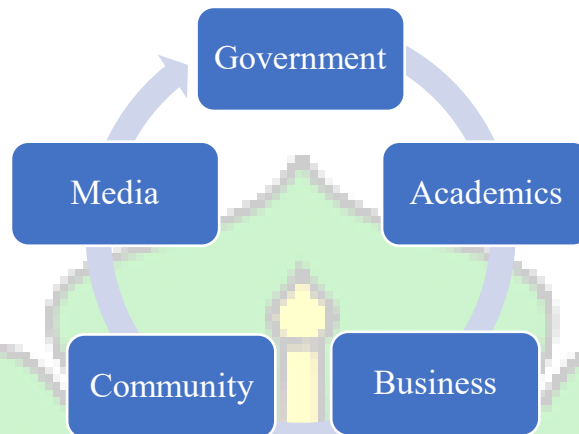
Elemen Government merupakan yang paling aktif dan dominan, dengan BPBD sebagai lead coordinator yang mengorkestrasi respons dari berbagai aktor. Elemen Community menunjukkan partisipasi yang relatif tinggi, baik melalui keterlibatan masyarakat dalam pemadaman swadaya maupun melalui advokasi dan data yang disediakan WALHI Aceh. Elemen Media berperan dalam diseminasi informasi meskipun

belum terlembaga dalam sistem penanggulangan bencana secara formal. Elemen Akademisi belum teridentifikasi memiliki peran yang signifikan dan konsisten dalam ekosistem ini. Yang paling kritis, elemen Business (sektor swasta/perkebunan) tidak hanya absen dalam upaya penanggulangan, tetapi justru terindikasi sebagai aktor yang berkontribusi pada terjadinya karhutla melalui praktik land clearing ilegal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam konteks karhutla di Aceh Besar masih berada pada fase yang tidak seimbang, di mana beban penanganan terkonsentrasi pada Government dan sebagian Community, sementara Akademisi dan Business hampir tidak terlibat secara konstruktif. Implikasi dari ketidakseimbangan ini adalah bahwa sistem penanggulangan karhutla menjadi fragil dan tidak berkelanjutan karena bergantung pada kapasitas satu elemen saja.



Gambar 4. 1 Model Kolaborasi Pentahelix Dalam Menanggulangi Karhutla di Kabupaten Aceh Besar



Sumber: *Diolah oleh peneliti berdasarkan Devian et al. (2026).*

Temuan mengenai ketimpangan kolaborasi Pentahelix ini relevan dibandingkan dengan penelitian Devian, mengenai tata kelola kolaboratif adaptif berbasis Pentahelix dalam mitigasi karhutla di Kotawaringin Timur untuk mendukung pencapaian SDGs 13 (Climate Action) dan SDGs 15 (Life on Land).⁷¹

Penelitian tersebut menekankan pentingnya adaptabilitas kelembagaan lintas kelima elemen Pentahelix sebagai prasyarat keberhasilan mitigasi karhutla jangka panjang. Jika dibandingkan, temuan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan pola yang serupa pada aspek dominasi elemen Government, namun berbeda pada elemen Community: penelitian ini menemukan bahwa Community di Aceh Besar, melalui WALHI Aceh dan partisipasi masyarakat lokal sebagai first responder, justru menunjukkan tingkat keaktifan yang relatif tinggi, sementara elemen Business dan Academics sama-sama tertinggal jauh di kedua lokasi penelitian.

⁷¹ Indra Devian et al., "Adaptive Pentahelix Collaborative Governance for Forest and Land Fire Mitigation: Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin, Indonesia."

Kesamaan pola ketertinggalan elemen Academics dan Business pada dua konteks daerah yang berbeda ini, yaitu Kotawaringin Timur dan Aceh Besar, mengindikasikan bahwa persoalan tersebut kemungkinan bersifat sistemik dalam tata kelola karhutla berbasis Pentahelix di Indonesia, bukan semata problem lokal yang unik pada satu wilayah. Implikasinya, penguatan kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif lokal semata, tetapi memerlukan dorongan kebijakan pada tingkat provinsi maupun nasional yang secara eksplisit mendorong keterlibatan sektor akademik dan usaha dalam skema mitigasi bencana lingkungan, misalnya melalui insentif riset terapan bagi perguruan tinggi lokal atau dorongan tanggung jawab lingkungan bagi entitas usaha yang beroperasi di kawasan rawan karhutla.

4.3.3 Keterkaitan Teori Peran dan Model Pentahelix

Meskipun Teori Peran dan Model Pentahelix memiliki unit analisis yang berbeda, yang pertama berfokus pada perilaku dan ekspektasi individu/lembaga, sedangkan yang kedua berfokus pada struktur kolaborasi multi-aktor, kedua kerangka tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar. Teori Peran menjelaskan mengapa suatu elemen Pentahelix aktif atau pasif, yaitu dengan menelusuri sejauh mana ekspektasi, perilaku, kesesuaian, penerimaan, kejelasan, performa, dan hambatan peran terbentuk pada level aktor individual di dalam elemen tersebut. Sebaliknya, Model Pentahelix menyediakan peta struktural yang menunjukkan bagaimana akumulasi kekuatan maupun kelemahan peran pada level aktor tersebut bermuara pada pola kolaborasi lintas sektor secara keseluruhan.

Sebagai ilustrasi, dominasi elemen Government dalam kerangka Pentahelix pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui kombinasi capaian yang relatif tinggi pada dimensi

role expectations, role clarity, dan role performance, khususnya pada BPBD, sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Sebaliknya, absennya elemen Business dapat dijelaskan melalui ketiadaan role expectations yang terformalisasi terhadap sektor usaha dalam kerangka regulasi penanggulangan karhutla di tingkat kabupaten. Sektor usaha bahkan tidak memiliki role expectations yang eksplisit untuk dipenuhi, karena secara kelembagaan mereka tidak pernah dilibatkan sebagai bagian dari sistem peran itu sendiri. Demikian pula, keterlambatan elemen Academics dalam kerangka Pentahelix berakar pada rendahnya role acceptance dan role behavior di kalangan akademisi, bahwa keterlibatan akademisi selama ini lebih bersifat individual dan ad hoc.

Dengan mengintegrasikan kedua kerangka ini, penelitian ini berargumen bahwa penguatan kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat dilakukan semata-mata melalui penambahan struktur formal kelembagaan, misalnya membentuk forum multipihak baru, tetapi harus dimulai dari penguatan dimensi-dimensi peran yang paling lemah pada level aktor, terutama role expectations bagi elemen Business dan role acceptance-role behavior bagi elemen Academics. Tanpa penguatan pada level peran individual/kelembagaan ini, struktur kolaboratif formal sekalipun berpotensi menjadi kerangka kosong yang secara administratif ada namun tidak berfungsi secara substantif, suatu risiko yang perlu diantisipasi apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hendak membentuk forum koordinasi karhutla berbasis Pentahelix di masa mendatang.

Sintesis ini juga menegaskan bahwa kedua kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat saling menguatkan (mutually reinforcing) ketimbang berdiri sendiri-sendiri. Teori peran memberikan resolusi mikro atas fenomena yang oleh Model Pentahelix hanya digambarkan secara makro-struktural, sementara Model Pentahelix

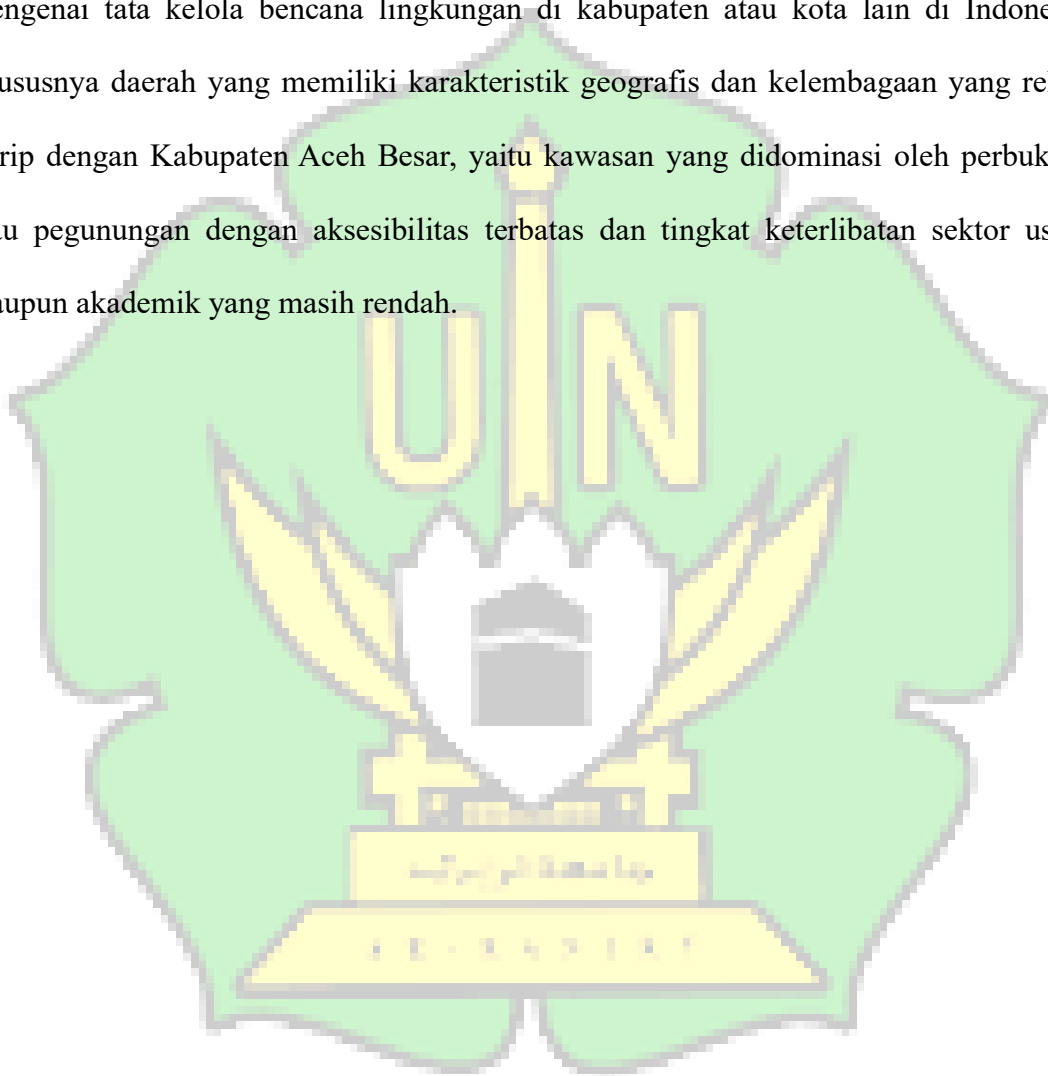
memberikan konteks sistemik yang menempatkan temuan-temuan mikro dari teori peran ke dalam peta kolaborasi multipihak yang lebih luas dan bermakna secara kebijakan.

4.3.4 Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa bukti empiris bahwa ketujuh dimensi peran tidak berkontribusi secara merata dalam menjelaskan efektivitas tata kelola bencana lingkungan, melainkan membentuk semacam hierarki kekuatan penjelas (*explanatory hierarchy*), di mana dimensi *role delay/role conflict* memiliki daya jelas paling tinggi terhadap kegagalan sistem, sementara *role expectations* dan *role clarity* memiliki daya jelas yang relatif rendah karena kedua dimensi tersebut umumnya sudah terpenuhi secara normatif di hampir seluruh konteks kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menguji secara lebih sistematis, termasuk secara kuantitatif, dimensi peran mana yang paling dominan terhadap keberhasilan penanggulangan bencana lingkungan pada konteks-konteks daerah yang berbeda.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa intervensi kebijakan penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat lagi difokuskan pada penguatan payung regulasi semata, mengingat payung regulasi pada dasarnya sudah relatif memadai. Fokus intervensi yang lebih mendesak adalah pada penguatan mekanisme investigasi dan penegakan hukum pascakejadian, formalisasi protokol koordinasi multipihak yang mengikat secara prosedural, bukan sekadar informal-personal, serta perluasan basis aktor Pentahelix untuk melibatkan sektor usaha dan akademisi secara terstruktur, bukan sekadar insidental.

Penelitian ini juga memberikan implikasi metodologis, yaitu bahwa penggunaan gabungan teori peran dan Model Pentahelix terbukti mampu menangkap fenomena tata kelola kolaboratif secara lebih kaya dibandingkan penggunaan salah satu kerangka saja. Pendekatan gabungan semacam ini berpotensi direplikasi pada studi-studi serupa mengenai tata kelola bencana lingkungan di kabupaten atau kota lain di Indonesia, khususnya daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan yang relatif mirip dengan Kabupaten Aceh Besar, yaitu kawasan yang didominasi oleh perbukitan atau pegunungan dengan aksesibilitas terbatas dan tingkat keterlibatan sektor usaha maupun akademik yang masih rendah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar masih berjalan sendiri-sendiri, lebih berfokus pada penanganan setelah kebakaran terjadi, dan belum terintegrasi dengan baik. BPBD Kabupaten Aceh Besar telah menjalankan perannya sebagai koordinator utama dengan dukungan nyata dari Polri, Damkar, dan masyarakat dalam fase respons darurat.

Namun demikian, berdasarkan tujuh indikator Teori Peran, ditemukan bahwa role performance masih belum optimal dalam fase pencegahan dan rehabilitasi, sementara role delay yang signifikan terjadi dalam fungsi investigasi dan penegakan hukum pasca kebakaran. Berdasarkan Model Pentahelix, peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa sinergi antar elemen dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara seimbang. Elemen Government dan Community menunjukkan keterlibatan yang aktif, sementara elemen Academics, Business, dan Media belum terintegrasi secara optimal.

2. Faktor-faktor penghambat penanggulangan karhutla di Kabupaten Aceh Besar dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

- a. Faktor teknis dan infrastruktur, meliputi keterbatasan aksesibilitas medan geografis dan keterbatasan peralatan pemadaman
- b. Faktor kelembagaan dan regulasi, meliputi lemahnya mekanisme investigasi pasca-kebakaran, absennya protokol koordinasi multi-stakeholder yang terstandarisasi, serta keterbatasan anggaran operasional aparat, dan
- c. Faktor sosial dan budaya, meliputi masih adanya praktik pembakaran untuk land clearing dan rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap dampak karhutla.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Besar perlu segera menyusun dan mengoperasionalkan Protokol Koordinasi Multi Stakeholder Karhutla yang mengikat secara hukum, mencakup mekanisme koordinasi yang jelas antara BPBD, DLH, Polri, Damkar, media, LSM, dan akademisi dalam seluruh fase penanggulangan karhutla (pencegahan, respons, rehabilitasi).
2. Perlu dilakukan formalisasi mekanisme investigasi pasca kebakaran yang melibatkan Polri dan DLH secara sistematis untuk setiap kejadian karhutla, guna menciptakan efek jera yang konsisten dan memutus siklus impunitas yang selama ini menjadi hambatan struktural pencegahan karhutla.
3. Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan land clearing dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Kemudian pemerintah bertahap

melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau actor-aktor dulu baru ke Masyarakat.

4. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam kapasitas teknologi deteksi dini, termasuk integrasi data hotspot SIPONGI KLHK dan sistem satelit ke dalam protokol pemantauan rutin BPBD, serta pengembangan solusi transportasi alternatif untuk menjangkau kawasan terpencil yang tidak dapat diakses kendaraan konvensional.
5. BPBD dan pemangku kepentingan lainnya perlu melembagakan keterlibatan media, guna memastikan keberlanjutan peran strategis media sebagai simpul komunikasi dalam sistem penanggulangan karhutla.
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama instansi terkait perlu meningkatkan dukungan terhadap aspek teknis dan infrastruktur penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui penyediaan peralatan pemadaman yang lebih memadai serta peningkatan akses menuju wilayah-wilayah rawan kebakaran. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan lokasi rawan dan penempatan sarana-prasarana pemadaman secara strategis agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama pada daerah yang sulit dijangkau.
7. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas data. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam aspek implementasi qanun gampong dalam manajemen karhutla di Aceh sebagai mekanisme governance lokal yang inovatif, Serta meneliti efektivitas program pengendalian kebakaran berbasis masyarakat sesuai dengan kondisi budaya dan kelembagaan di Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2021). *Kapolda sebut kebakaran hutan dan lahan di Aceh karena dibakar*. <https://www.antaranews.com/berita/2025408/penanganan-karhutla-di-aceh-sudah-sesuai-instruksi-presiden>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2025). *Kabupaten Aceh Besar dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. <https://acehbesarkab.bps.go.id>
- Beck, E., Hartig, K., & Roos, K. (2008). Forest clearing by slash and burn. In E. Beck, J. Bendix, I. Kottke, F. Makeschin, & R. Mosandl (Eds.), *Gradients in a tropical mountain ecosystem of Ecuador* (pp. 371–374). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73526-7_39
- Biddle, B. J. (1986). *Recent developments in role theory*. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Budiningsih, K. (2017). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165–186. <https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.165-186>
- Clarke, A. (1999). *Qualitative research: Data analysis techniques*. *Professional Nurse*, 14(8), 531–533. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10532026/>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. J. (2012). The quintuple helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), Article 2. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>

- Devian, I., Gaol, L., Gamaputra, G., & Bisri, M. H. (2026). Adaptive pentahelix collaborative governance for forest and land fire mitigation: Advancing SDGs 13 (Climate Action) and SDGs 15 (Life on Land) in East Kotawaringin, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 664, Article 01009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202666401009>
- Fadhillah, F. (2017). Tanggung renteng dalam perkara perdata pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 51–85. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i1.35>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. <https://jdih.menlhk.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (t.t.). Laporan dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2026, Mei 18). Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan. SIPONGI KLHK.
- McKee, D., & Frankenberg, E. (2004). Health consequences of forest fires in Indonesia.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Novita Dewi, D., Sandria, A., & Santi Hatmini, S. (2023). Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani kasus kebakaran hutan Riau berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Jurnal Transborders*, 7(1), 49–56.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Putra, I. K., Saharjo, B. H., & Wasis, B. (2019). Analysis of Indonesian forest and land fire controlling operational policies: Case study: Siak Regency, Riau Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 363(1), Article 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/363/1/012016>
- Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis upaya penegakan hukum dan pengawasan mengenai kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7(1), 27–36.
- Schadewitz, H. J., & Blevins, D. R. (1997). A review of the data collection process. *Journal of Technical Writing and Communication*, 27(4), 417–424.

- Showstack, R. (1997). *Scientists assess impact of Indonesia fires: Micro studies lead to macro understanding*. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 78(44), 457–458. <https://doi.org/10.1029/97EO00304>
- Sluss, D. M., Van Dick, R., & Thompson, B. S. (2011). Role theory in organizations: A relational perspective. In S. Zedeck (Ed.), *APA handbook of industrial and organizational psychology: Vol. 1. Building and developing the organization* (pp. 505–534). American Psychological Association.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Ulya, N. A., Waluyo, E. A., Lestari, S., & Premono, B. T. (2018). Peat swamp forest degradation: Impacts, affected communities and losses. *E3S Web of Conferences*, 68, Artikel 03007.
- Vitas, C. I. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 2(1), 52–63.
- Wilson, C. (2014). Semi-structured interviews. In *Interview techniques for UX practitioners* (pp. 23–41). Morgan Kaufmann

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi









Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2650/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 September 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 1. **Muazzinah, M.P.A.** Sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.** Sebagai pembimbing II
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : **Sahrin**
 NIM : **220802044**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Judul : **Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Besar**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 29 September 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1120/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar
3. Polres Aceh Besar
4. Pemadam Kebakaran Aceh Besar
5. WALHI Aceh
6. Media
7. Akademisi
8. Masyarakat Setempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802044

Nama : SAHRIN

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Dusun umah paluh desa buntul musara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR***

Banda Aceh, 10 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Oktober 2026